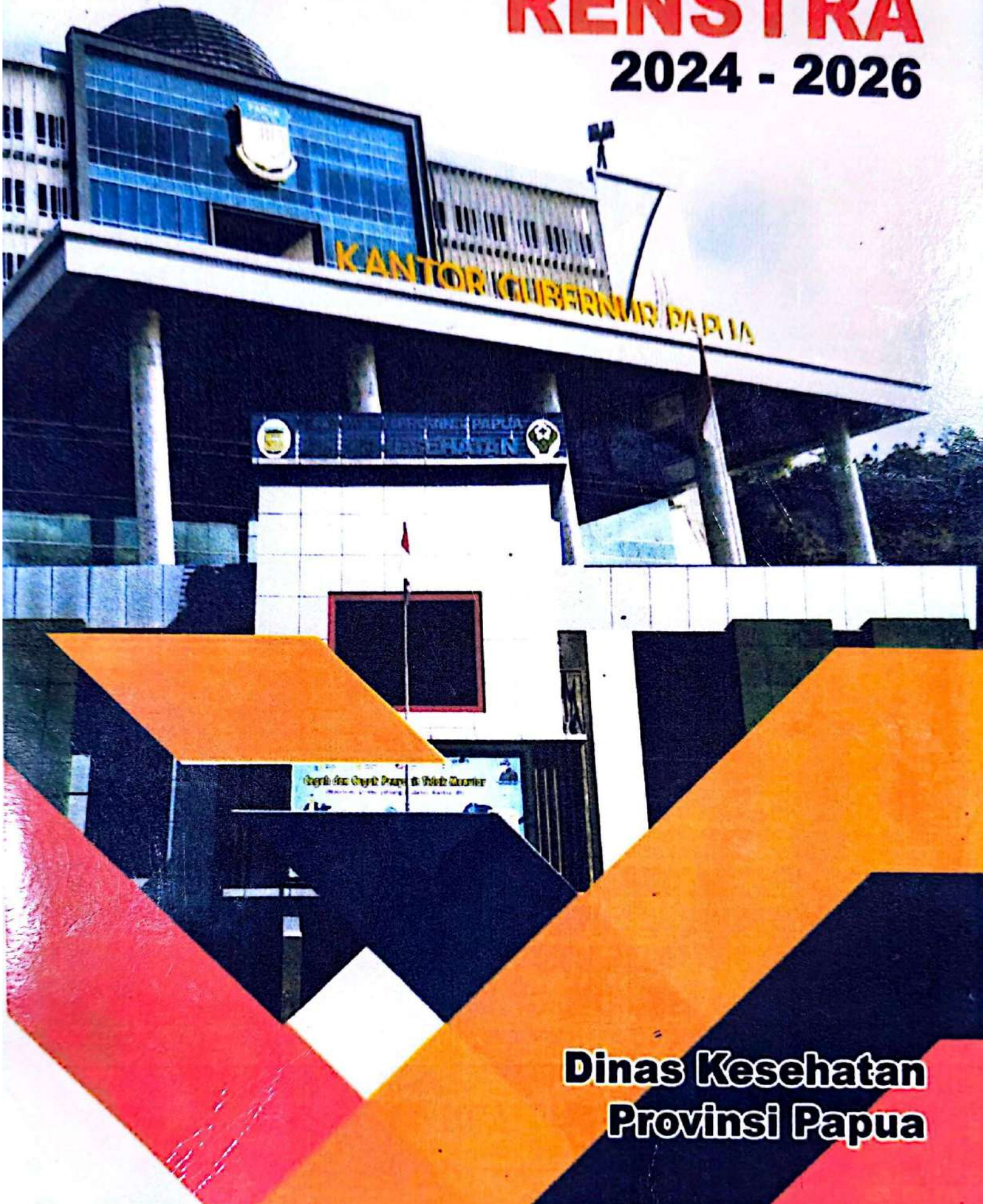


RENSTRA

2024 - 2026



**Dinas Kesehatan
Provinsi Papua**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena Kasih dan Penyertaanya sehingga dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada kami dapat menyelesaikan penulisan / penyusunan Rencana Strategis antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2024 – 2026.

Besar harapan kami dengan telah selesainya penyusunan Rencana Strategis antara tahun 2024 – 2026 ini maka pelayanan kesehatan di Provinsi Papua akan semakin lebih baik, disamping itu semua kami juga sangat menyadari bahwa dalam penulisan / penyusunan Rencana Strategi antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2024 – 2026 ini tentunya masih belum dari kata sempurna, sehingga saran dan masukan guna penyempurnaannya sangat kami harapkan agar perbaikan penulisan / penyusunan Renstra selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Jayapura, November 2024



PL KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA
Drs. LARRY PONGTIKU, MHM
NIP. 19680111 199803 1 006

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUMUM PENYUSUNAN	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN	10
2.2. SUMBERDAYA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA.....	24
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	31
2.4. ANGGARAN & REALISASI ANGGARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..	50
2.5. KELOMPOK SASARAN LAYANAN	66
2.6. KRISIS KESEHATAN, KLB DALAM RANGKA CAPAIAN SPM PROVINSI..	67
2.7. PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2024 – 2029	69
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	70
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	70
3.2. TELAHAH TUJUAN DAN SASARAN PEJABAT KEPALA DAERAH	71
3.3. TELAH RENSTRA KEMENTERIA KESEHATAN	71
3.4. TELAH RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA	74
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	77
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
BAB VI RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	102
BAB VIII PENUTUP	107

BAB I

PENDAHULUAN

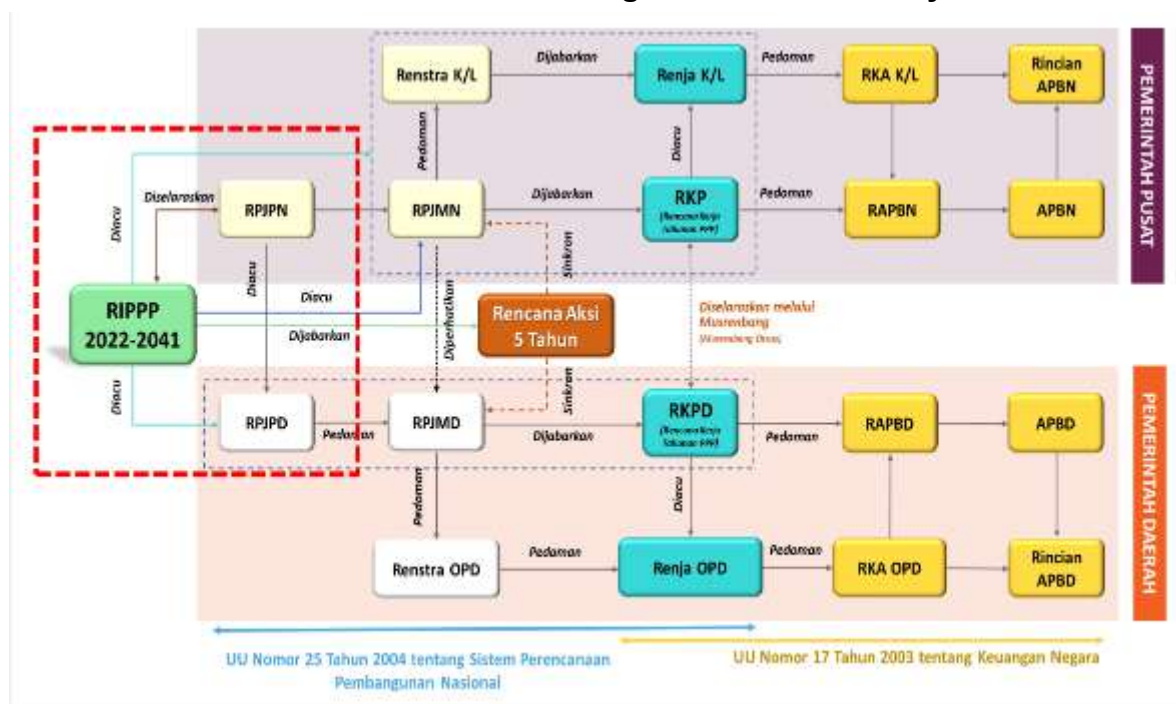
1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/3207/SET tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua menyusun Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 transisi sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Provinsi Papua perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, dimana sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, periode akhir masa jabatan Gubernur Papua berakhir pada bulan September 2023. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 yang merupakan Renstra transisi selama jangka

waktu 2024 sampai dengan 2026 menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja (Renja) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menjadi pedoman dalam rincian APBD.


Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokrenda Lainnya



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang – Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi




Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;


- 
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 25. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;
 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas;
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02.02/Menkes/52/ 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; dan
 38. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Renstra transisi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan kerangka, arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan kepada para pelaksana program dan kegiatan serta



stakeholder terkait dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai suatu tolak ukur pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis transisi ini adalah :

- 1). Menjabarkan strategi dan menjamin keselarasan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 serta RPJP Provinsi Papua Tahun 2005 – 2025.
- 2). Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan.
- 3). Menjadi tolak ukur Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Kesehatan.
- 4). Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sehingga tercipta sinergitas, sinkronisasi dan integrasi Renstra Dinas dengan RPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN,

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN,

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran pelayanan Dinas Kesehatan;

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN,

Memuat permasalahan pelayanan berdasarkan capaian kinerja pada Bab II dan isu strategis Dinas Kesehatan.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN,

Memuat tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024 – 2026; dan/ atau Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, *Cascading* kinerja mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing.

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan, pendanaannya.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaaran Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 melalui indikator kinerja utama, penentuan target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII. PENUTUP,

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua, susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua merupakan pelaksana pemerintahan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur,


Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Tugas pokok dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan;
- 3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan kesehatan;
- 4) Penyusunan pelaksanaan kebijakan sistem kesehatan daerah;
- 5) Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan serta Pelayanan Kesehatan;
- 6) Pengawasan, Pemantauan Pengendalian dan Evaluasi Sistem Upaya dan kegiatan Pengembangan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan serta Pelayanan Kesehatan;
- 7) Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan pada seluruh sarana kesehatan di wilayah provinsi;
- 8) Perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan khusus;
- 9) Perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang dissabilitas;
- 10) Pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- 11) Pengawasan, pemantauan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi pelayanan rumah sakit;
- 12) Pengawasan, pengendalian, pembinaan kesehatan kerja dan olahraga;
- 13) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pengembangan informasi kesehatan;
- 14) Pembangunan, pengembangan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kesehatan;


- 
- 15) Perencanaan dan pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - 16) Penanganan kesehatan fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 17) Pemungutan, penata usahaan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan kesehatan;
 - 18) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana dibidang kesehatan;
 - 19) Pengawasan dan pengendalian izin dibidang kesehatan;
 - 20) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat, perangkat daerah dibidang kesehatan;
 - 21) Penegakan peraturan perUndang – Undangan dibidang kesehatan,
 - 22) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas,
 - 23) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas,
 - 24) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kesehatan.

2.1.1. Uraian Tugas Sekretariat dan Bidang sebagai berikut :

Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meng - koordinasikan dan mengendalikan kegiatan adminstrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.


Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan kesehatan;
- 2) Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian;


- 
- 4) Koordinasi pengelolaan kepegawaian, keuangan aset dan dokumen di UPT;
 - 5) Pengelolaan administrasi keuangan;
 - 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - 7) Pengelolaan aset dan barang milik negara;
 - 8) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perUndang – Undangan;
 - 10) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisial) di bidang kepegawaian;
 - 11) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT;
 - 12) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - 13) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - 14) Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi dibidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu, kecelakaan lalu lintas, jaminan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, kecelakaan lalu lintas dan jaminan kesehatan;

- 
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, kecelakaan lalu lintas, dan jaminan kesehatan;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, kecelakaan lalu lintas, dan jaminan kesehatan;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, kecelakaan lalu lintas, dan jaminan kesehatan;
 - 5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, kecelakaan lalu lintas, dan jaminan kesehatan; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi dibidang surveilans dan imunisasi, pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana, pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta NAPZA.



Untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana, pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana, pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana, pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana, pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor,


penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;

- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana, pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.4. Bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang – Undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;

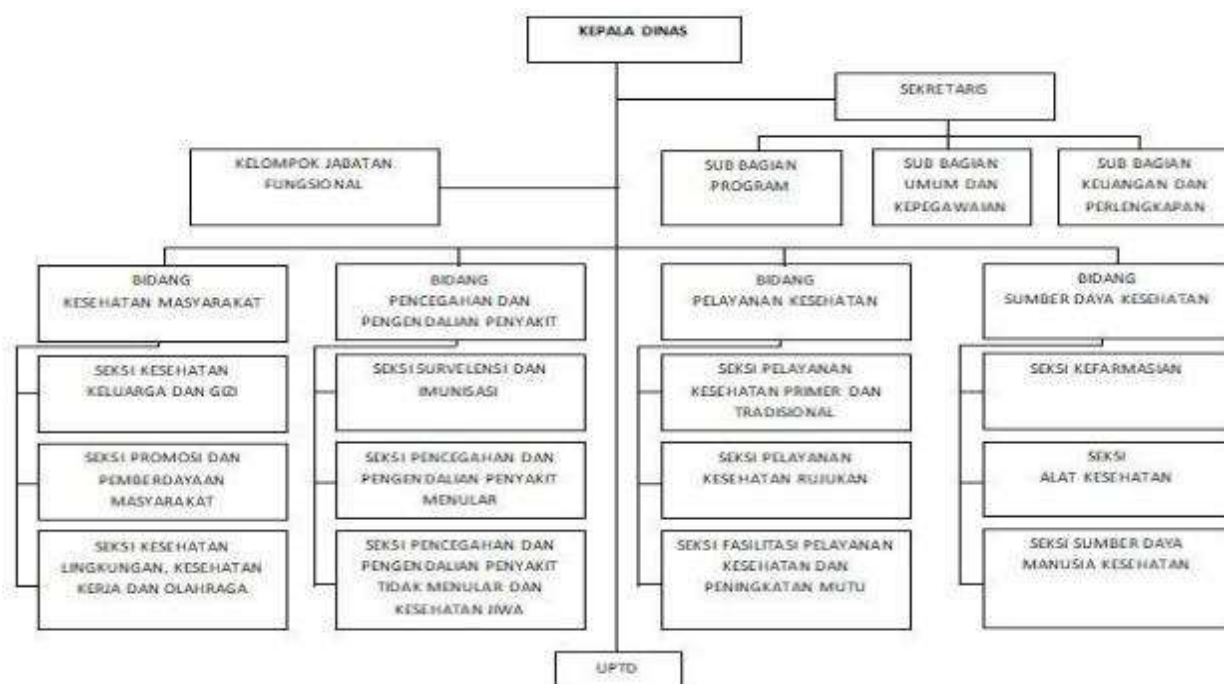
- 
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.5. Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta koordinasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- 3) Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga.
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- 5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.


Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagaimana bagan struktur berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua



Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari:

- 1). **Sekretariat** terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan,
- 2). **Bidang Kesehatan Masyarakat** terdiri dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga,
- 3). **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** terdiri dari Seksi Surveilensi dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

- 
- 4). **Bidang Pelayanan Kesehatan** terdiri dari Seksi Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu.
 - 5). **Bidang Sumber Daya Kesehatan** terdiri dari Seksi Kefarmasian, Seksi Alat Kesehatan dan Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

1. UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan
2. UPT Balai Latihan Kesehatan (BALATKES)
3. UPT Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosa dan Malaria (ATM)
4. UPT Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)

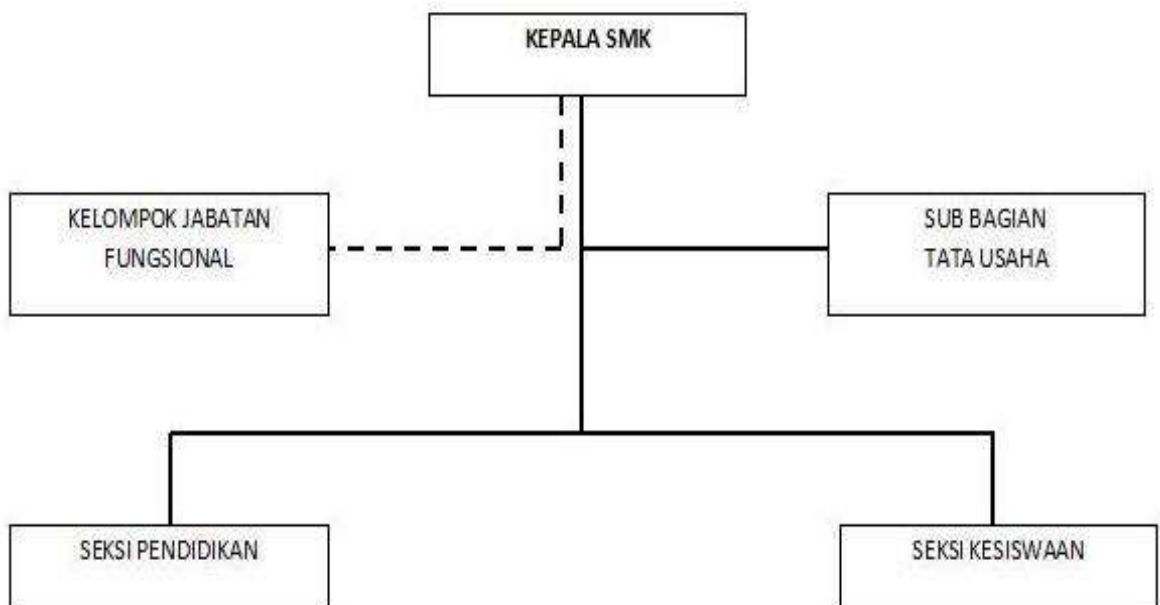
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Organisasi dan Tata Kerja pada UPT.

UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan dan Balai Latihan Kesehatan (Balatkes) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017. Sedangkan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017.

1. UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan

Susunan organisasi terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan, Seksi Kesiswaaan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan



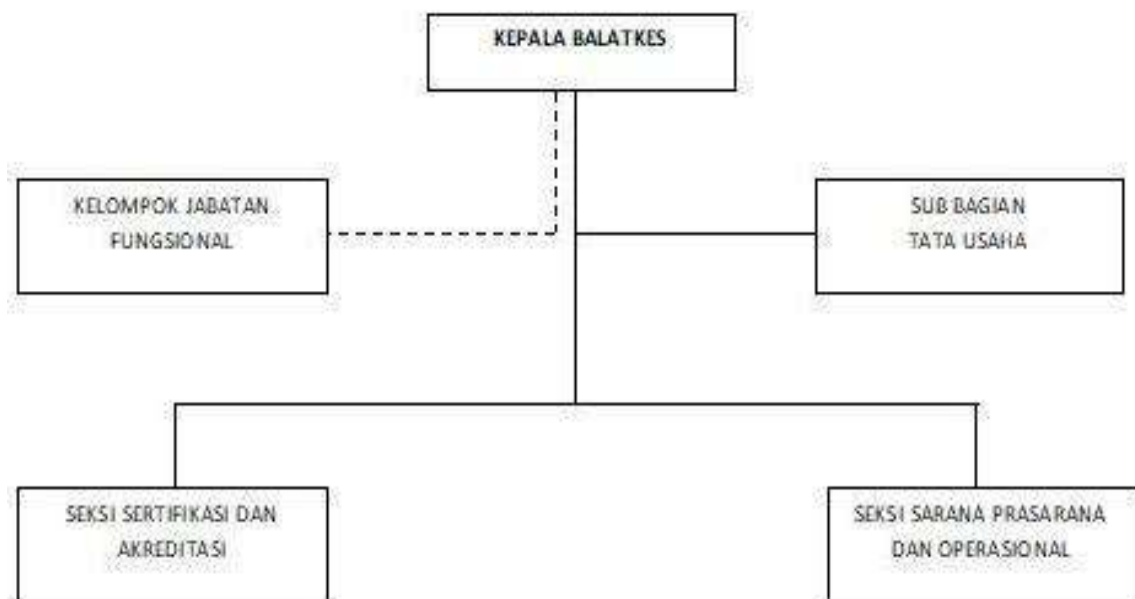
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses pendidikan, belajar mengajar siswa program analis kesehatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya SMK Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan proses pendidikan belajar mengajar dan praktek sesuai kurikulum;
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan konseling siswa;
- 3) Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dan
- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

- 2. UPT Balai Latihan Tenaga Kesehatan (Balatkes)** Susunan organisasi terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Sertifikasi dan Akreditasi, Seksi Sarana Prasarana dan Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Balai Latihan Kesehatan



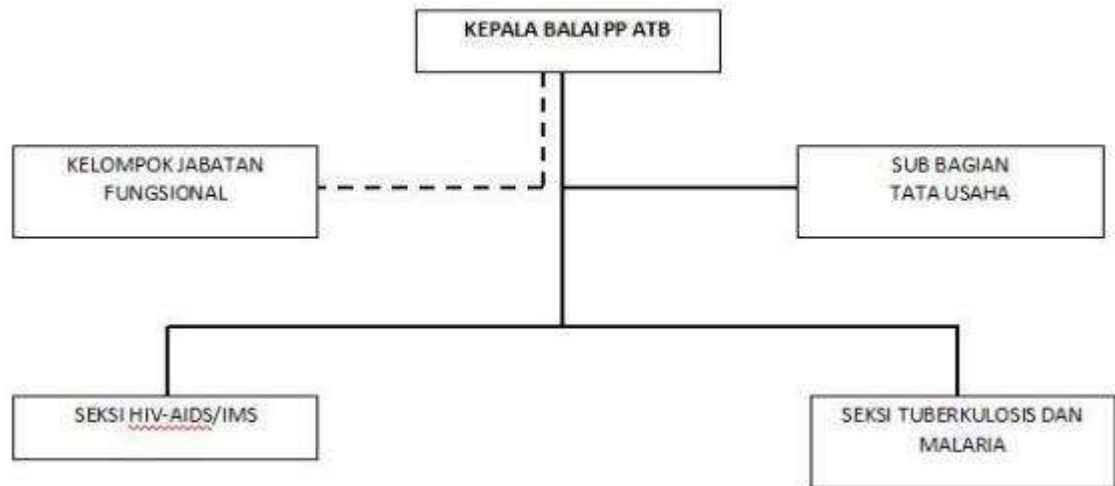
Balai Latihan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang tenaga kesehatan dan masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balatkes mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan mutu pelayanan kesehatan;
- 3) Pengelolaan sarana dan prasarana latihan dan
- 4) Pengelolaan urusan ketata usahaan.

3. UPT Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosa dan Malaria (Balai PP ATM). Susunan organisasi Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi HIV-ADIS/IMS, Seksi Tuberkulosa dan Malaria dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.4
Struktur Organisasi Balai Pencegahan dan Pengendalian
AIDS Tuberkulosa dan Malaria



pokok menyelenggarakan proses penanggulangan dan pengendalian masalah AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, program kegiatan penanggulangan dan pengendalian

masalah AIDS, Tuberkulosis dan Malaria serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

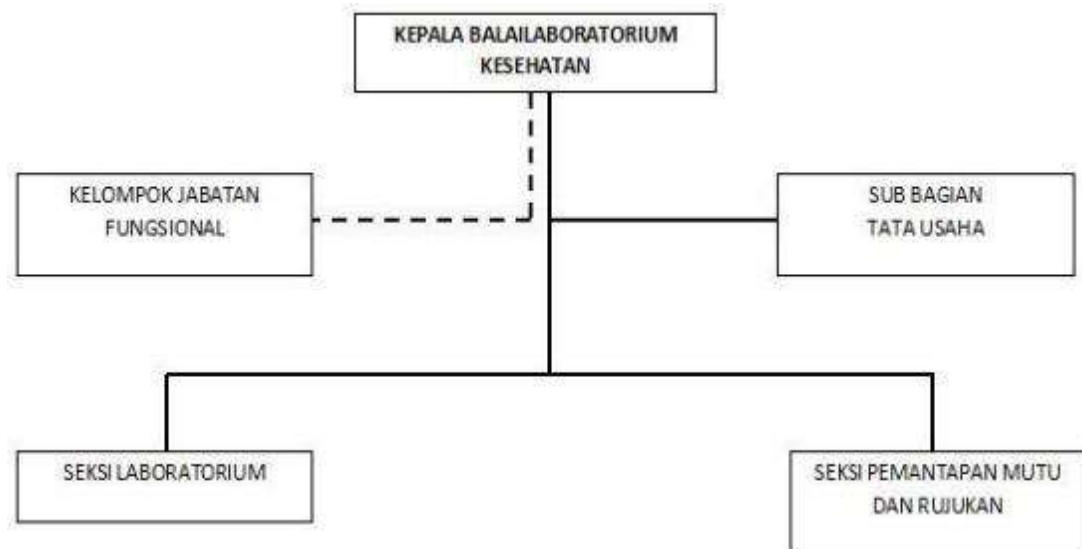
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan proses penanggulangan dan pengendalian masalah Kesehatan,
- 2) Penyusunan rancangan kebijakan umum, rumusan kebijakan teknis sertakoordinasi pelaksanaan bimbingan dan pengendalian
- 3) Pelaksanaan evaluasi, kebijakan dan strategi, peraturan dan standar dan program AIDS Tuberkulosis dan Malaria
- 4) Pengelolaan sarana prasarana
- 5) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

4. UPT Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

Susunan organisasi UPT Balai Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium, Seksi Pemantapan Mutu dan Rujukan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.5
Struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Daerah



UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan laboratorium yang meliputi mikrobiologi dan imunologi, kimia patologi, toksikologi dan kesehatan lingkungan serta pemantapan mutu dan rujukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan program kerja
- 2) Pelaksanaan sistem rujukan
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium
- 4) Pelaksanaan rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan dan teknologi
- 5) Pengelolaan rujukan tenaga dan sarana, dan
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Berdasarkan struktur organisasi terdapat 56 (lima puluh enam) jabatan struktural (eselon) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Eselon di Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Tahun 2023

No	Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	-	5	12	17
2.	UPT Balai Pelatihan Kesehatan	-	1	2	3
3.	UPT Balai Laboratorium Kesehatan	-	-	3	3
4.	UPT SMK Kesehatan	-	1		1
5.	UPT PP (ATM) AIDS, Tuberculosis, Malaria	-	1	3	4
JUMLAH		-	8	20	28

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2023

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua didukung oleh sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 364 orang yang dirinci menurut golongan ruang sebagai berikut, Golongan II : 82 orang, Golongan III : 243 orang, Golongan IV : 36 orang dan Golongan 5 : 3 orang sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

**Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua
dirinci berdasarkan Unit Kerja dan Tingkat Golongan Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	V	
1.	Sekretariat		20	59	2	1	82
2.	Bidang Yankes		12	23	5	-	40
3.	Bidang Kesmas		4	25	8	-	37
4.	Bidang SDK		5	16	5	-	26
5.	Bidang P2P		2	30	2	-	34
6.	UPT Labkesda		18	27	1	-	46
7.	UPT Balatkes		11	19	5	2	37
8.	UPT ATM		3	30	6	-	39
9.	UPT SMK Kesehatan		5	13	-	-	18
10.	Pindah Unit Kerja*)		2	1	2	-	5
Jumlah		-	82	243	36	3	364
Prosentase		-	22,53	66,76	9,89	0,82	100

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Prov. Papua

Sedangkan Tingkat pendidikan ASN di masing-masing unit kerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

**Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dirinci
berdasarkan Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD/SMP/ SLTA/ Sederajat	AK/D.III	D.IV/ S.1	S. 2	S. 3	
1.	Sekretariat	26	14	37	4	1	82
2.	Bidang Yankes	6	11	19	4	-	40
3.	Bidang Kesmas	2	7	20	8	-	37
4.	Bidang SDK	5	-	17	4	-	26
5.	Bidang P2P	6	4	16	8	-	34
6.	UPT Labkesda	13	28	4	1	-	46

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD/SMP/ SLTA/ Sederajat	AK/D.III	D.IV/ S.1	S. 2	S. 3	
7.	UPT Balatkes	14	4	13	6	-	37
8.	UPT ATM	6	4	24	4	1	39
9.	UPT SMK Kesehatan	5	2	9	2	-	18
10.	Pindah Unit Kerja*)	1	1	2	1	-	5
	Jumlah	84	75	161	42	2	364
	Prosentase	23,08	20,60	44,23	11,54	0,55	100

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Papua

Sedangkan Tingkat dan Jenis Pendidikan ASN per golongan dan jenis kelamin sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dirinci berdasarkan
Jenis dan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023**

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN															JENIS KELAMIN		JUMLAH
		I				II				III				IV		V (PPPK)			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B		L	P	
1.	SD - SMP	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	SMA / SLTA																		
	Umum	-	-	-	-	34	2	2	1	6	6	-	-	-	-	-	35	19	54
	Kejuruan	-	-	-	-	8	2	3	1	5	10	-	-	-	-	3	15	14	29
3.	D.I - D.II																		
	Non Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	D.III																		
	Non Kesehatan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	3
	Kesehatan	-	-	-	-	-	1	20	6	12	9	13	11	-	-	-	14	58	72
5.	D.IV / S.1																		
	Non Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	15	13	-	-	-	19	24	43
	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	37	9	16	49	5	2	-	36	82	118
6.	S.2																		
	Non Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	1	-	6	6	12
	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	17	2	-	15	15	30
7.	S.3																		
	Non Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	Jumlah	-	-	-	-	42	5	27	8	70	39	54	80	29	7	3	145	219	364

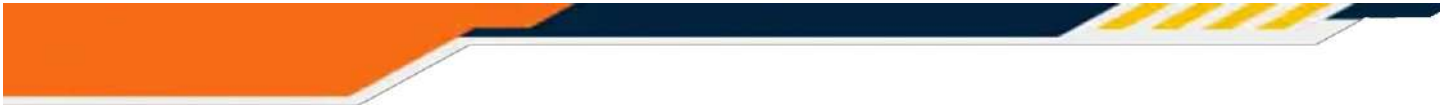
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Prov. Papua

2.2.2. Sarana Kesehatan

Berikut adalah data sarana kesehatan yang ada di Provinsi Papua Tahun 2023, dilihat dari jenis dan jumlah.

Tabel 2.5
Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Papua Tahun 2023

No	Jenis Sarana Kesehatan	Lokasi										Jumlah
		Provinsi	Kota Jayapura	Jayapura	Biak	Kep. Yapen	Waropen	Supiori	Keerom	Sarmi	Mamberamo Raya	
1.	Puskemas Non DTP	-	14	16	15	13	7	3	1	6	3	78
2.	Puskemas DTP	-	-	6	6	4	3	2	9	5	8	43
3.	Puskesmas Pembantu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Puskesmas Keliling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rumah Sakit Umum Daerah	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
6.	Rumah Sakit Jiwa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	Rumah Sakit POLRI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8.	Rumah Sakit TNI AD	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9.	Rumah Sakit TNI AL	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
10.	Rumah Sakit TNI AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rumah Sakit Swasta	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
12.	Rumah Sakit Bersalin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Jenis Sarana Kesehatan	Lokasi										Jumlah
		Provinsi	Kota Jayapura	Jayapura	Biak	Kep. Yapen	Waropen	Supiori	Keerom	Sarmi	Mamberamo Raya	
13.	Klinik	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14.	Laboratorium Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Optikal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Apotik	-	102	57	29	27	10	3	3	8	-	239
17.	Toko Obat	-	5	10		10	1	-	1	-	4	31
18.	Industri Kecil Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Posyandu	-	213	226	296	174	87	44	116	106	59	1.321
20.	Rehabilitasi Korban NAPZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Pengobat Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	PBF	-	26	1	2	3	-	-	1	-	-	33
23.	PAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Bidang Yankes, SDK Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di telah tersedia di Kecamatan dan Kelurahan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar, nol kilometer. Sedangkan untuk sarana kesehatan lainnya (praktek dokter, rumah sakit, apotik, balai pengobatan/klinik, toko obat, dan laboratorium swasta) masih terkonsentrasi di pusat perkotaan, belum merata disetiap wilayah.

2.2.3. Aset / Modal

Tabel 2.6
Data Aset Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022

NO	URAIAN	TAHUN 2021	PENGURANGAN 2022	PENAMBAHAN 2022	TAHUN 2022
	ASET TETAP				
1.	Tanah	53.846.620.000,00	-	-	53.846.620.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	86.238.002.988,44	2.232.104.400,00	-	86.238.002.988,44
3.	Gedung dan Bangunan	173.170.795.450,54	46.322.000,00	448.238.000,00	173.619.033.450,54
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.779.116.504,16	315.334.000,00	1.302.927.000,00	8.082.043.504,16
5.	Aset Tetap Lainnya	747.180.000,00	-	-	747.180.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	807.058.725,00	-	-	807.058.725,00
7.	Akumulasi Penyusutan				
	a. Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	b. Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	c. Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
	d. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	ASET LAINNYA				
1.	Kemitraan dgn Pihak Ketiga	-	-	-	-
2.	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
3.	Aset Lain-lain	-	-	-	-
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Prov. Papua



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua selama 4 tahun terakhir, yang menggambarkan pencapaian kinerja dari berbagai indikator yang telah ditetapkan menjadi target kinerja dari tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 – 2023 (TC.23)

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja				Capaian Kinerja					Rasio Capaian Kinerja					
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup		66,80		Tahun	65,36	66,0	67,03	68,01	68,01	69,06	65,79	65,93	71,85	66,80					
2	Angka kematian Ibu per 100.000		185		AKI	216	216	212	208	204	200	200	232	246	185	108	93	110	118,2	91
3	Angka Kematian Bayi Per 1000		14		AKB	24	24	23	22	21	20	18	11	9	14	58,3	75	47,8	41	67
4	Cakupan Rumah Tangga dengan sanitasi baik		47		Persen	35	35	36,3	38	39	40	33	33	33	47	113,5	94,2	90,7	86,8	120,5
5	Cakupan Distrik yang memiliki minimal 1 puskesmas yang bersertifikasi akreditasi		52		Persen	30,8	42,7	52,1	62,1	71,2	30,8	28,3	28,3	52	52	100	66,2	54,3	83,7	73
6	Cakupan Rumah Sakit Yang tersertifikasi akreditasi		89		Persen	62,8	86,1	100	100	100	62,8	68,1	68,1	89	89	100	79	68,1	89	89
7	Cakupan orang asli papua yang tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan papua		100		Persen	44	48	53	58	64	44	100	100	100	100	100	208,3	188,6	172,4	156,2
8	Cakupan kunjungan ibu hamil K4		61		Persen	30	40	50	60	70	25	34,4	34,4	61	61	83,3	86	68,8	101,6	87,1
9	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan		86		Persen	25	30	35	40	45	23	49,6	49,6	82,6	86	92	165,3	141,7	215	191,1
10	Cakupan Neonatus		81		Persen	25	30	35	40	45	22	47,4	47,4	81	81	88	158	135,4	202,5	180
11	Cakupan pelayanan anak balita		64,9		Persen	20	25	30	35	40	20	15	24	65	64,9	100	60	80	162,5	162,2
12	Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (Stunting)		92		Persen	27	26	25	24	23	29	14,8	34,6	91,8	92	107,4	57	138,4	383,3	400
13	Cakupan masyarakat akses terhadap air bersih		32		Persen	43,5	47,5	51,1	55,5	60	33	64,92	65	32	32	75,8	138	127,2	67,6	153,3
14	Cakupan keluarga akses terhadap sanitasi		47		Persen	20	22	24	27	30	18	49	45,8	47	47	90	185,5	190,8	174,0	156,6
15	Cakupan PHBS		0		Persen	35	37,5	40	42,5	45	32	0	0	0	0	91,4	0	0	0	0
16	Cakupan Poyandu Aktif		88		Persen	72	78	80	85	87	72	73,7	75,8	88	88	100	94,4	94,7	103,5	101,1
17	Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria		0		Persen	13,8	27,6	41,4	55,2	69	-	3,4	3,4	0	0	0	12,4	8,3	0	0
18	Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin		55		Persen	12,8	17,2	21,9	26,9	32,2	12,8	37,8	45	55	55	100	219,8	205,4	204,4	170,8

19	Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati	84		Persen	75	80	85	90	95	75	72	75,0	84	84	100	90	88,2	93,3	88,4
20	Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu	29		Persen	2	3	4	5	6	2	5	5	29	29	100	166,6	125	580	483,3
21	Cakupan Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA	97		Jumlah	7,6	11,4	15,2	19	23	7	10,3	10,5	97	97	92,1	90,3	69,0	510,5	421
22	Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)	67,4		Persen	74	79	84	89	95	46	53,5	55,6	67	67,4	61,1	67,7	66,1	75,2	80
23	Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	100		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan angka Prevalensi Kusta < 1 per 10.000 penduduk	11		Persen	15	17	19	21	23	10	4,3	4,3	11	11	67	25,2	22,6	52,3	47,8
25	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi filariasis	6		Jumlah	8	11	13	16	18	6	2	2	6	6	75	18,1	15,3	37,5	33,3
26	Cakupan puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis kesehatan (Perawat, bidan, kesling, analis kesehatan, gizi)	71		Jumlah	38	51	54	77	90	35	35,3	40,5	71	71	92,1	69,2	75	92,2	78,8
27	Cakupan Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin	100		Persen	82	85	87	90	92	90	94	94,08	100	100	110	110,5	108,1	111,1	108,6
28	Pelaksanaan Diklat Sesuai Standar	100		Persen	75	75	80	80	100	65	100	100	100	100	87	133,3	125	125	100
29	Cakupan puskesmas sesuai standar di daerah perbatasan	100			80	85	90	95	100	80	56,3	58,6	100	100	100	66,2	65,1	105,2	100
30	Cakupan daerah terisolir/terpencil yang dilayani SATGAS KUANG	0		Persen	96	96	96	96	96	96	85	85	0	0	100	88,5	88,5	0	0
31	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dan gizi	24		Persen	30	35	40	45	50	28	22	24	24	24	93,3	62,8	60	53,3	48

A. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Angka kematian ibu (AKI) / Maternal Mortality Rate (MMR) adalah salah satu indikator hasil pembangunan di bidang kesehatan, semakin rendah AKI maka pembangunan suatu wilayah mengindikasikan semakin baik pembangunan di bidang kesehatan. AKI secara nasional cenderung bergerak fluktuatif. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 KLH meningkat menjadi 346 per 100.000 KLH pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010), namun menurun menjadi 305 per 100.000 KLH berdasarkan hasil Survei Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015, sedangkan AKI Provinsi Papua sebesar 573 per 100.000 (SDKI 2012), berdasarkan SUPAS 2015 diestimasikan AKI Provinsi Papua sebesar 216 per 100.000 KH, lebih rendah dari target RPJMD 2013-2018 yakni sebesar 250 KH. AKB nasional (SDKI 2012) sebesar 32 per 1000 KH sedangkan untuk Provinsi Papua sebesar 54 per 1000, sedangkan pada tahun 2015 AKB nasional turun menjadi 24 per 1000 KH (SUPAS 2015), untuk Provinsi Papua SUPAS 2015 tidak mengeluarkan angka. Gambaran kematian ibu dan kematian bayi di Provinsi Papua yang bersumber dari laporan rutin kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 2.8
Jumlah Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Papua

No	Kabupaten	Angka Kematian Ibu			Angka Kematian bayi		
		Pembilang	Pembagi	Satuan	Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 100.000 KH	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 1000 KH
1.	Jayapura	9	2.588	348	70	2.588	27
2.	Kepulauan Yapen	5	1.489	336	33	1.489	22
3.	Biak Numfor	2	3.306	60	36	3.306	11
4.	Sarmi	2	558	358	18	558	32
5.	Keerom	2	1.015	197	7	1.015	7
6.	Waropen	-	132	0	4	132	30
7.	Supiori	-	202	0	2	202	10
8.	Mamberamo Raya	1	285	351	3	285	11
9.	Kota Jayapura	6	5.036	119	25	5.036	5
Total		27	14.611	185	198	14.611	14

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga Dinkes Prov. Papua

Papua Data pada tabel diatas tidak menggambarkan angka kematian ibu dan kematian bayi yang sesungguhnya karena diperoleh dari laporan rutin beberapa kabupaten/kota (persentase penyampaian laporan rendah). Namun demikian dengan kemajuan pembangunan selama periode 5 tahun terakhir, sehingga dapat dinyatakan bahwa derajat kesehatan ibu dan anak telah meningkat.

- B.** Program Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator kinerja jumlah distrik yang memiliki minimal 1 (satu) puskesmas tersertifikasi akreditasi telah mencapai target yang ditentukan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 34 puskesmas di 34 distrik, dari target 10 puskesmas, hasil ini melampaui target, namun kinerja ini baru mencapai 8,6% dari 395 Puskesmas (341 distrik) masih ada 361 Puseksmas atau 92,4 % puskesmas yang belum tersertifikasi akreditasi, sehingga diharapkan pada tahun 2018 – 2023 seluruh puskesmas telah tersertifikasi akreditasi. Sebaran puskesmas yang tersertifikasi akreditasi di Provinsi Papua sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9**Jumlah Puskesmas yang Teregistrasi dan Tersertifikasi Akreditasi Menurut Kabupaten/kota Tahun 2023**

NO	KABUPATEN	Jumlah Puskesmas yang Teregistrasi dan Tersertifikasi Akreditasi		
		Jumlah Puskesmas	Terakreditasi	Persen
1.	Jayapura	22	19	86
2.	Kepulauan Yapen	17	8	47
3.	Biak Numfor	21	10	47
4.	Sarmi	11	8	72
5.	Keerom	10	1	10
6.	Waropen	10	7	70
7.	Supiori	5	2	40
8.	Mamberamo Raya	11	0	0
9.	Kota Jayapura	14	5	35
	Total Jumlah	121	43	49

C. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit) Jumlah rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 24 rumah sakit atau 57% dari 42 rumah sakit yang ada, masih ada 18 rumah sakit atau 43% yang belum tersertifikasi akreditasi. Sehingga pada tahun 2018 – 2023 Rumah Sakit yang harus tersertifikasi akreditasi berjumlah 18 rumah sakit. Untuk mendukung pelaksanaan akreditasi jumlah Rumah Sakit yang mengupdate data Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) baru 29 rumah sakit yang dapat mengisi dan mengupdate ASPAK, atau baru mencapai 83% faktor yang mempengaruhi adalah sulitnya jaringan internet, data sarana, prasarana, peralatan RS yang tidak terupdate secara rutin di tingkat rumah sakit, petugas

yang berganti-ganti dan kurangnya respon yang cepat untuk verifikasi dari Dinas Kesehatan. Jumlah dan distribusi rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut :


Tabel 2.10
Jumlah dan Distribusi Rumah Sakit yang Tersertifikasi Akreditasi
di Provinsi Papua Tahun 2023

NO	KABUPATEN	Cakupan Rumah Sakit yang Teregistrasi		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit	Persen (%)
1	Jayapura	1	1	100
2	Kepulauan Yapen	1	1	100
3	Biak Numfor	2	2	100
4	Sarmi	-	1	-
5	Keerom	1	1	100
6	Waropen	-	1	-
7	Supiori	1	1	100
8	Mamberamo Raya	-	1	100
9	Kota Jayapura	8	9	100
Total Jumlah		14	18	78


Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Papua

D. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium

Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan di Balai Laboratorium Kesehatan Jayapura adalah pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 4 tahun (2014 – 2017) pemeriksaan laboratorium klinik meningkat dari tahun ketahun berturut, pada tahun 2014 sebanyak 57.346 speciemn , tahun 2015 sebanyak 64.163 spesimen, tahun 2016 sebanyak 72.913 spesimen dan tahun 2017 sebanyak 73.393 spesimen dengan kisaran kenaikan dari 94% – 51%, demikian juga dengan pemeriksaan kesehatan masyarakat



meningkat berturut-turut, tahun 2014 sebanyak 6.535 specimen, tahun 2015 sebanyak 7.814 specimen tahun 2016 sebanyak 13.049 specimen dan tahun 2017 sebanyak 15.104 sepcimen, dengan capaian kinerja berkisar 120% – 220%. Sedangkan pendapatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) berturut – turut, tahun 2014 sebesar Rp. 298.059.000, tahun 2015 sebesar Rp. 263.990.000, tahun 2016 sebesar Rp. 300.511.000 dan tahun 2017 sebanyak Rp. 309.761.000 dengan target sebesar Rp. 250.000.000 setiap tahun. Capaian kinerja melebihi target sebesar 106% – 124%. Bila dibandingkan dengan anggaran yang dikelola relatif konstan tidak ada peningkatan yang signifikan bahkan bila dikaitkan dengan inflasi, anggaran yang tersedia berkurang. Selain melakukan pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua juga melakukan Pengawasan Mutu Pemeriksaan Laboratorium yaitu Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME). Pencapaian jumlah fasyankes yang melakukan PME tuberkulosis, HIV, dan malaria pada tahun 2014, 2015 dan 2016 berhasil mencapai target dengan rasio lebih dari 100% sedangkan pada tahun 2017 tidak mencapai target dengan rasio 36 – 41 %. Program Pengembangan Obat Asli Daerah Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional sampai tahun 2017 sebanyak 7 puskesmas (70%) dari target sebanyak 10 puskesmas. demikian juga jumlah puskesmas yang menyelenggarakan asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional, ramuan dan ketrampilan sebanyak 7 puskesmas (70%) dari target 10 puskesmas. Capaian kinerja program berkorelasi dengan anggaran dan realisasi yakni berkisar 70% target ini akan dicapai hingga tahun 2026 nati.



Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Kinerja pelayanan kesehatan keluarga dan gizi secara keseluruhan dari 14 (empat belas) indikator kinerja 8 indikator yang masih rendah pencapaiannya pada tahun 2018, pelayanan antenatal K4 63%, penanganan komplikasi maternal 38%, pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN1) 69%, penanganan komplikasi pada neonatal 50%, puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan remaja 75%, Ibu hamil mendapat 90 tablet tambah darah 71%, Bayi umur < 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 60%, Remaja putri yang mendapat tablet tambah darah 85%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota, dari tiga indikator SPM yaitu Pelayanan Antenatal (K4), Pelayanan Persalinan (PF) dan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN1) masih jauh dibawah standar dengan disparitas yang cukup besar antara wilayah pesisir dengan pegunungan.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016 – 2017 Status Gizi Balita umur 0 – 23 bulan menurut indeks BB/U Gizi Buruk dan kurang pada tahun 2016 sebesar 15,1% meningkat menjadi 19,8% pada Tahun 2017, sedangkan untuk BADUTA (Bawah Dua Tahun) pada tahun 2016 sebesar 14,7% meningkat menjadi 18,3 pada tahun 2017. sedangkan apabila dibandingkan antar kabupaten/kota maka beberapa kabupaten yang cukup tinggi diatas 20% yaitu Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Waropen, Supiori, dan Kota Jayapura (lihat tabel 2.10) Untuk prevalensi kasus stunting (balita pendek dan sangat pendek) Gizi Balita umur 0 – 59 bulan menurut indeks BB/U, pada tahun 2015 sebesar 28,6%, tahun 2016 sebesar 28,0% dan tahun 2017 meningkat menjadi 33,0%. antara kabupaten/kota rata-rata diatas 20%,

Tabel 2.11

**Status Gizi Balita umur 0-23 Bulan menurut indeks BB/U
Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2022**


Kabupaten/Kota	BB/U				TB/U			
	Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
Jayapura	38	226	2130	169	88	292	2030	9
Kepulauan Yapen	48	154	1614	16	58	212	1546	14
Biak Numfor	106	460	2680	129	131	294	2830	22
Sarmi	11	66	529	51	15	82	554	6
Keerom	34	152	1339	108	34	169	1419	3
Waropen	37	112	445	13	28	70	393	5
Supiori	27	100	419	15	22	93	445	0
Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Jayapura	167	776	6788	558	248	653	7187	58

E. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan secara keseluruhan dari 6 indikator kinerja hanya indikator desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 % untuk kesehatan tercapai dari target 40% pada tahun 2017 menjadi 73% pada 2017. Pencapaian terendah pada indikator Perilaku Hidup Sehat (PHBS) tahun 2017 sebesar 10% masih jauh dari target pada tahun 2018 yaitu sebesar 80 % sejalan dengan upaya promosi Kesehatan memegang peran penting dalam Pembangunan Kesehatan target pemerintah provinsi papua melalui Dinas Kesehatan akan terus dicapai hingga tahun 2028.

F. Program Pengembangan Lingkungan

Pencapaian kinerja Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan tahun 2023, terdapat 5 indikator kinerja Kesehatan Lingkungan, diantaranya : Persentase Sarana Air Minum (SAM) yang diawasi kualitas air minumnya sesuai standar




sebesar 38% (18 SAM), Jumlah Kepala Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang aman (Jamban Sehat) sebanyak 26.450 KK (10,57%), Jumlah Kampung/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebanyak 102 Kampung/Kelurahan (10,21%), Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU) yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar sebesar 78,4% (355 TFU), Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 61,3% (1.179 TPP). Dari 5 indikator tersebut, yang telah memenuhi target hanya Pengawasan TFU dan TPP.

G. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pencapaian kinerja Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan indikator utama adalah Jumlah Puskesmas melaksanakan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebanyak 43 Puskesmas (36,13%).

H. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Surveilans Penyakit Menular

Indikator Surveilans Penyakit Menular, penanganan kejadian luar biasa (KLB) < 24 jam, setiap tahunnya realisasinya sudah mencapai 100% ini menandakan bahwa setiap KLB sudah ditangani dalam kurun waktu < 24 jam. Terdapat kesenjangan Persentase Respon Penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini KLB dan Kelengkapan Laporan SKDR untuk mencegah terjadinya KLB di Kab/Kota artinya respon kabupaten/kota masih kurang dalam kegiatan ini. Sementara Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE) diakhir tahun renstra 2018 hanya 2 kabupaten yang dapat melaksanakan kegiatan ini.




Imunisasi dari 4 indikator imunisasi dalam Renstra (2014 – 2018) capaiannya sebagai berikut :

- a. Desa UCI mencapai 50%, artinya hanya 50% Kampung di Provinsi Papua yang memiliki bayi dengan imunisasi lengkap, menjadi perhatian bahwa masih terdapat 50% Kampung dengan bayi tanpa imunisasi lengkap.
- b. Anak usia 12 – 24 bulan yang mendapatkan imunisi DTP-HB Hib Lanjutan masih rendah kurang yaitu 60% tahun 2017 dan 11% tahun 2018.
- c. Imunisasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) telah mencapai target sebesar 95 %
- d. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Kabupaten/Kota mencapai 80% IDL.


Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit DBD Persentase kabupaten/kota dengan Insiden Kasus DBD < 49 per 100.000 penduduk tercapai 100% artinya kabupaten/kota endemis mampu menurunkan Kasus DBD menjadi < 49 per 100.000 penduduk, Angka Bebas Jentik 95% tercapai 100 % artinya Angka Bebas Jentik Kabupaten/Kota yang endemis penyakit DBD yang sudah ditentukan tiap tahun dalam renstra telah tercapai. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Filaria atau Penyakit Kaki Gajah Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria dalam menurunkan Angka Mikro Filaria menjadi < 1% tercapa 100 % artinya semua Kabupaten endemis filaria di Provinsi Papua yang ditargetkan dalam 5 tahun Renstra yaitu sebanyak 23 Kabupaten berhasil menurunkan angka MF < 1%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya Surat Edaran Gubernur Papua No : 443/12875/SET Tanggal 20 Oktober 2016 agar Kabupaten/Kota Endemis Filariasis menganggarkan dalam DPA APBD (Otsus Bidang Kesehatan) Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sampai dengan akhir periode

renstra hanya 3 kabupaten/kota yang mempunyai Peraturan Bupati/Wali Kota atau PERDA tentang KTR ditahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 trend peningkatan kasus Filariasis masih tinggi dengan Provinsi Papua yang hanya tinggal 8 Kabupaten dan satu Kota, target 8 kabupaten yang eliminasi,tahun 2019, 2021 : 11 kabupaten, 2021 : 13 kabupaten, 2022 : 16 kabupaten dan 2023: 18 kabupaten sedangkan realisasi 2 kabupaten ditahun 2019, 2 kabupaten ditahun 2020, 6 kabupaten ditahun 2021, 6 kabupaten ditahun 2022 dan 2023 juga 6 kabupaten.

Kesehatan Jiwa Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa, hanya 8 Puskesmas atau 4% dari 395 puskesmas yang ada dari 29 kabupaten kota di Provinsi Papua. Di Provinsi Papua saat ini dengan 9 kabupaten masih dilaksanakan dan datanya akan dilaporkan. Penyakit Hepatitis Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Sosialisasi dan Advokasi Deteksi Dini Hepatitis B dan C, pada akhir tahun 2018 baru 12 Kabupaten/Kota hingga tahun 2023, program ini dilaksanakan ada yang tidak berjalan dikarenakan tidak tersedianya anggaran namun puskesmas serta rumah sakit yang melaksanakanya belum dilaporkan. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis pada kelompok yang paling beresiko ada 9 kabupaten/kota atau 31% dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dengan Provinsi Papua sisa 8 kabupaten dan 1 kota program ini masih dilaksanakan. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SKD KLB Hepatitis A dan E, baru 12 Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan ini dengan 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi papua kegiatan ini masih berjalan. Penyakit Diare Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan layanan Dehidrasi Oral Aktif (LROA) 11 kabupaten/kota atau 41% dari 29 Kabupaten/kota di Provinsi Papua setelah pemekaran provinsi papua,provinsi papua tinggal 8 kabupaten dan 1 kota program ini masih berjalan.



Persentase kabupaten/kota yang melakukan Sosialisasi Typhoid ke Anak Sekolah 1 kabupaten atau 3% dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua program ini masih berjalan di 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi papua hingga saat ini. Penyakit Kecacingan Jumlah kabupaten/kota endemis yang melaksanakan Penyakit Kecacingan Jumlah kabupaten/kota endemis yang melaksanakan penemuan kasus Taeniasis/ Cystisercosis/ Neurocystisercosis dilaksanakan di 8 kabupaten dan 1 kota. Penyakit Kusta Angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 3.3 per 10.000 penduduk, telah menurun dari 5,5 per 10.000 pada tahun 2014, walaupun belum mencapai target yakni 2 per 10.000 pada tahun 2018 hingga tahun 2023 ini program penyakit kusta masih berjalan di 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi papua. Kabupaten/Kota dalam menurunkan angka cacat kusta dari kasus baru yang ditemukan walaupun secara kumulatif baru 14 Kabupaten yang sudah mampu menurunkan. Penyakit Frambusia Angka prevalensi penyakit frambusia per 10.000 penduduk dan terdapat peningkatan angka kesakitan penyakit frambusia setiap tahunnya dalam 5 tahun, pada tahun 2014 prevalensi frambusia 22 per 10.000 penduduk menjadi 50 per 10.000 penduduk pada 2018 hingga tahun 2023 program ini masih berjalan. Penyakit Pneumonia Persentase kabupaten/kota melaksanakan penemuan kasus dan tatalaksana pneumonia sesuai standar 22 kabupaten/kota atau 76% dari 29 kabupaten/kota sebelum pemekaran dan setelah pemekaran kasus ini masih terjadi di tahun 2022 hingga kini. Penyakit Malaria Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 penduduk 46.79 pada tahun 2017, telah menurun dari 55 pada tahun 2014, namun masih belum mencapai target yakni 45 pada tahun 2018. Persentase Konfirmasi laboratorium dan Pengobatan Malaria dengan ACT 100%, artinya semua suspek malaria ditegakkan dengan Laboratorium atau RDT serta semua



yang sakit malaria diobati dengan obat yang sesuai standar hingga tahun 2023 ini program malaria masih berjalan . Menurunkan kasus malaria dilihat dari Slide Positiv Rate (SPR) yang ditargetkan dapat menurun sampai dengan 11% pada tahun 2017 ternyata masih tetap tinggi sebesar 39.69% dari 38% pada tahun 2014. Penyakit HIV/AIDS Penemuan kasus baru HIV dan Penderita AIDS pada tahun 2018 berjumlah 37.991 kasus meningkat bila dibandingkan pada tahun 2014 yakni 16.050 kasus, penemuan kasus lebih tinggi dari target yakni 25.000 kasus. ODHA yang mendapatkan ARV pada tahun 2018 sebesar 59.3%, lebih rendah dari target sebesar 80%, namun meningkat dari 48.8% pada tahun 2014. Tujuan Pengendalian HIV AIDS yaitu mencapai Three Zeroes 2030 ada Strategi yang harus dicapai yaitu Strategi Fast Track 90-90-90. Penyakit Tuberkulosis (TBC) Penemuan kasus baru BTA +(CDR) pada tahun 2017 sebesar 32.3% menurun bila dibandingkan dengan penemuan pada tahun 2014 yakni sebesar 45%, target pada tahun 2017 penemuan kasus baru BTA+(CDR) 70%, sehingga kinerja penemuan kasus baru BTA+ hanya 45% tahun 2020 target pengobatan dan penemuan kasus TBC 80% realisasi 72%, 2021 target 85% realisasi 84% 2022 target 90% realisasi 84% 2023 target kinerja 95% realisasi 84% artinya secara akumulasi target penemuan kasus dan minum obat TBC masih sangat rendah sehingga diperlukan upaya dari pemerintah khususnya pemerintah provinsi papua melalui dinas Kesehatan dalam menanggulangi masalah ini. Selain itu penyakit HIV/AIDS dengan penemuan kasus di tahun 2022 mencapai 50.400 yang minum obat ARV 8.368 masih rendah.

I. Program Sumberdaya Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan


Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata merupakan masalah yang mengakibatkan rendahnya pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil dan terisolir. Sehingga hal ini menjadi fokus pembangunan kesehatan pada tahun ketersediaan tenaga Kesehatan di provinsi papua saat ini khususnya di 8 kabupaten dan 1 kota masih terbatas terutama profesi dokter, bidan, tenaga apoteker dan profesi Kesehatan lainnya untuk itu Dinas Kesehatan provinsi papua ditahun 2019 hingga tahun 2023 dan tahun 2024 hingga 2026 ini akan berfokus pada pemenuhan tenaga Kesehatan yang ada dilayanan Kesehatan di Puskesmas , Pustu, Rumah Sakit terutama didaerah sulit akses seperti Mamberamo Raya, Waropen dan Kepulauan Biak Numfor, Yapen, daerah perbatasan Kota Jayapura dan kabupaten Keerom serta daerah sulit dikabupaten Sarmi.

J. Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan

Sejak berdirinya sampai dengan tahun 2018 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan yang semula bernama Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) telah meluluskan 2.366 orang yang sebagian besar adalah putra-putri Papua. Lulusan SMK Kesehatan merupakan tenaga Laboratorium yang diperuntukkan mengisi kebutuhan tenaga laboratorium di Puskesmas, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di Provinsi Papua. Lulusan SMK Kesehatan Jayapura periode 2018 – 2023 berjumlah 366 orang. Jumlah siswa pada tahun 2023 sebanyak 439 orang dan direncanakan penerimaan siswa baru setiap tahun 2024 sebanyak 120 orang.

K. Balai Latihan Kesehatan Capaian Kegiatan

- a. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan Peningkatan mutu penyelenggara- an pelatihan ini berkaitan dengan peningkatan mutu lulusan pelatihan yaitu adanya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pelaksanaan pelatihan Keluarga Sehat (40 angkatan @ 30 orang) dan Konsep Perubahan Perilaku (1 angkatan @ 30 orang) dan Jabatan fungsional Administrasi Kesehatan (1 angkatan @ 30 orang) telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan tetapi belum disertai dengan Evaluasi Paska Pelatihan.
- b. Peningkatan pengembangan diklat kesehatan Dalam rangka melaksanakan pengembangan diklat kesehatan, Balatkes Provinsi Papua mengembangkan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan. Selain itu, disusun dan dikembangkan kurikulum dan modul yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Balatkes Provinsi Papua juga mengembangkan metode dan teknologi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Peningkatan pengembangan diklat kesehatan ini belum optimal karena belum dilaksanakan secara optimal di Balatkes Provinsi Papua.
- c. Peningkatan Pengendalian Mutu Pelatihan Dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian mutu pelatihan, Balatkes Provinsi Papua mengembangkan program akreditasi dan sertifikasi baik untuk pelatihan maupun untuk institusinya. Selain itu, untuk memonitor atau mengevaluasi mutu lulusan, Balatkes Provinsi Papua melaksanakan evaluasi pasca



pelatihan. Pelaksanaan Evaluasi paska pelatihan dilakukan setiap akhir pelaksanaan pelatihan tetapi belum secara luass di lapangan.

- d. Peningkatan kapasitas institusi pelatihan Peningkatan kapasitas institusi pelatihan ini dilakukan dengan cara meningkatkan mutu SDM penyelenggara pelatihan, sarana dan prasarana serta pelayanan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Peningkatan mutu SDM penyelenggara pelatihan dilakukan melalui pelaksanaan TOT, MOT, penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan teknologi. Perlu peningkatan penyediaan teknologi yang lebih luas mengingat makin berkembangnya pelaksanaan pelatihan.

L. Grand Strategi Balatkes Provinsi Papua :


- a. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur, tenaga kesehatan dan masyarakat Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan ini berkaitan dengan peningkatan mutu lulusan pelatihan yaitu adanya peningkatan proses pembelajaran, pengkajian dan pengembangan pelatihan serta pengendalian mutu pelatihan.
- b. Peningkatan sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan adalah dengan cara kerja sama dengan pihak bank secara online untuk pembayaran dana pendidikan. Pelatihan pengelola keuangan untuk menjadi tenaga satuan pengawas internal (SPI).
- c. Pengembangan SDM sesuai kebutuhan. Tenaga pendidikan dan kependidikan ditingkatkan kuantitasnya dengan cara pengangkatan pegawai baru dan peningkatan kualitas melalui tugas belajar/izin belajar ke jenjang

yang lebih tinggi serta mengikutsertakan SDM dalam pelatihan, bench marking, workshop atau short course.

- d. Peningkatan Pelayanan Penunjang Pelatihan Pelayanan penunjang pelatihan terdiri dari pelayanan akomodasi, konsumsi, komunikasi dan informasi serta pelayanan penunjang pelatihan yang lain seperti ibadah, hiburan dan olahraga bagi peserta pelatihan / pelanggan.
- e. Pengembangan unit-unit bisnis Potensi yang dimiliki Balatkes Provinsi Papua saat ini memungkinkan untuk dikembangkan menjadi unit bisnis, seperti auditorium, bus, laboratorium, klinik terpadu, bengkel kerja (pengembangan teknologi tepat guna) dan teknologi informasi. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Latihan Kesehatan Provinsi Papua merupakan fokus dalam pembangunan Tahun 2024 – 2026, rehabilitasi gedung kantor, pembangunan auditorium dan pengadaan meubeler serta reakreditasi, Pembangunan dan rehabilitasi dapat direlaisasikan 100%, serta pengembangan pelatihan dibalai pelatihan tenaga Kesehatan Jayapura yang terus dilaksanakan dari tahun 2019 hingga tahun 2026 nanti dengan memanfaatkan potensi sarana fasilitas yang ada.

M. Pelayanan Kesehatan Gender

Dalam program kegiatan sub kegiatan dinas Kesehatan provinsi papua dalam tahun 2024 sampai 2026 ini menggambarkan gender menjadi fokus kegiatan maupun sub kegiatan seperti advokasi kemitraan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi papua, pelaksanaan komonikasi informasi Kesehatan perilaku hidup bersih sehat, pengembagangan dan pelaksanaan upaya keshatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), peningkatan mutu dan kompetensi teknis sumberdaya manusia Kesehatan,



penyelenggaraan jaminan kesehatan papua yang terintegrasi dengan jaminan Kesehatan nasional, program sediaan farmasi dan alat Kesehatan, pengelolaan penyakit menular tidak menular, program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Kesehatan pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan, pengelolaan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, IMS, TBC, malaria, pengelolaan imunisasi, peningkatan mutu pelayanan Kesehatan, pengelolaan penanganan Kesehatan ibu anak, penanganan gizi Kesehatan masyarakat, stunting, kesehatan lingkungan, sarana prasarana kesehatan, laboratorium kesehatan, sekolah menengah analisis kesehatan jayapura, balai pelatihan tenaga Kesehatan, pelayanan Kesehatan haji, krisis kesehatan, penyediaan layanan kesehatan rujukan dan dasar, pengembangan fasilitas, penyediaan telemedicine.

Kegiatan dan sub kegiatan diatas mengabarkan pelayanan kesehatan berbasis gender dimana dalam pelaksanaanya mengundang laki-laki maupun perempuan mengikuti kegiatan, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis monev juga ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan di kantor dinas kesehatan papua yang melakukan bimtek maupun monev serta di dinas kesehatan kabupaten/ kota maupun di rumah sakit dan puskesmas dan pedoman gender mainstreaming dilayanan publik melibatkan 40 : 40 : 20 (40% laki – laki, 40% perempuan dan 20% disabilitas, minoritas, komunitas orang HIV, AIDS, Kusta dan lain – lain).

2.4. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua selama 5 (lima) tahun ini didukung dengan berbagai sumber anggaran, seperti..... Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 2.12 (TC.24)

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
Rencana Program, Kegiatan Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Tipe	Kategori	Kelompok	Kode	Tipe Kegiatan/Indikator/Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja Program (Output) dan Zait Kegiatan (Output)	Kategori	Unit Laporan pada RKA-Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program dan Harapannya Pendanaan								Unit Kerja dan Organisasi	Tipe		
							2020		2021		2022		2023		2024				Korupsi, Penyalahgunaan Anggaran, dan Pencurian	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Meningkatkan Akuntabilitas, Birokrasi Otonomi Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Meningkatnya Akuntabilitas, Birokrasi Otonomi Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Nilai Sekip		DINAS KESEHATAN			157.806.047.895,70	157.806.047.895,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00					
			1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			157.806.047.895,70	157.806.047.895,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00					
			1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			157.806.047.895,70	157.806.047.895,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00					
			1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			157.806.047.895,70	157.806.047.895,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00					
			1 02 01 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			157.806.047.895,70	157.806.047.895,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00					
			1 02 01 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			157.806.047.895,70	157.806.047.895,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00	152.845.777.200,00					
			1 02 01 1 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000					
			1 02 01 1 02 05 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000					
			1 02 01 1 02 05 1 02	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1000000000000	1000000000000	1000000000000	1000000000000	1000000000000	1000000000000	1000000000000	1000000000000	1000000000000					
			1 02 01 1 02 05 1 02 05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	15	15					
			1 02 01 1 02 05 1 02 05 05	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	15	15					
			1 02 01 1 02 05 1 02 05 05 05	Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	15	15					

[illegible]

0					1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									Dinas Kesehatan	204 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)		
										Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber	-	-	30 Dokumen	-	0,00	30 Dokumen	100.000.000,00	30 Dokumen	30 Dokumen	Dinas Kesehatan	205 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
				1	02	03	3.02			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	-	-	30 Dokumen	-	50.000.000,00	-	500.000.000,00	-	30 Dokumen	Dinas Kesehatan	206 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
				1	02	03	3.02		0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik									Dinas Kesehatan	207 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia	Dokumen	3 Dokumen	#VALUE!	3 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	500.000.000,00	10 Dokumen	#VALUE!	Dinas Kesehatan	208 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
				1	02	03	3.03			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	-	Dokumen	9 Dokumen	#VALUE!	-	9 Dokumen	1.000.000.000,00	9 Dokumen	#VALUE!	Dinas Kesehatan	209 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
				1	02	03	3.03		0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN				-			-	-		Dinas Kesehatan	210 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
										Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang	50 Orang	#VALUE!	50 Orang	0,00	100 Orang	1.000.000.000,00	100 Orang	#VALUE!	Dinas Kesehatan	211 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
				1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	199.200.000,00	9 Dokumen	1.000.000.000,00	9 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Kesehatan	212 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	04	1.01			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	99.900.000,00	9 Dokumen	500.000.000,00	9 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Kesehatan	213 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	04	1.01		0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF				-			-	-		Dinas Kesehatan	214 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
										Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan	Sarana	32 Sarana	#VALUE!	32 Sarana	99.900.000,00	38 Sarana	500.000.000,00	41 Sarana	41 Sarana	Dinas Kesehatan	215 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
				1	02	04	1.02			Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-	9 Dokumen	#VALUE!	9 Dokumen	99.300.000,00	9 Dokumen	500.000.000,00	9 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Kesehatan	216 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	1 Unit	0,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	550.000.000,00			08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
			1	02	01	10	00	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saling	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat di 9 Kabupaten/Kota	Tingkat kesehatan masyarakat di 9 Kabupaten/Kota meningkat							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	Unit	-	2 Unit	0,00				2 unit	1.000.000.000,00			08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
			1	02	01	10	00	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
									Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, umum	Unit	-	6 Unit	0,00				4 unit	100.000.000,00			08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
			1	02	01	10	00	05	Pengadaan Mebel			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
									Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	Paket	-	6 Paket	0,00	20 Paket	500.000.000,00	20 Paket	550.000.000,00			08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	
			1	02	01	10	00	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
									Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Diadakan	Unit	-	12 Unit	0,00	20 Unit	500.000.000,00	20 Unit	550.000.000,00			08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	
			1	02	01	10	00	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	-	6 Unit	1.000.000.000,00	6 Unit	1.100.000.000,00	6 Unit	1.200.000.000,00	4 Unit	1.320.000.000,00		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
			1	02	01	10	00	18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.884.581.000,00	-	2.073.990.000,00	-	2.820.355.000,00	-	3.102.390.500,00	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
			1	02	01	10	00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	30 Laporan	0,00	20 Laporan	20.000.000,00	20 Lap	22.000.000,00			08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	
			1	02	01	10	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	-	1.177.000.000,00	10 Laporan	1.130.000.000,00	25 Laporan	1.800.000.000,00	25 Lap	1.980.000.000,00			08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
			1	02	01	10	00	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	Laporan	-	990.000.000,00	6 Unit	1.100.000.000,00	4 Unit	1.200.000.000,00	4 Unit	1.320.000.000,00			08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
			1	02	01	10	00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	-	188.861.000,00	3 Laporan	944.990.000,00	12 Laporan	1.000.355.000,00	12 Lap	1.100.390.500,00			08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
			1	02	01	10	00	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)
			1	02	01	10	00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak			-	-	-	-	-	-	-	-		08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)	08 Penerimaan Pajak (Dok. Laporan, Kabupaten Jayapura, Hutan, Ganti, Mendikabang Raga, Bakti, Gajah, Wirok, Naga)

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			7 Dokumen	50.000.000,00	7 Dokumen	55.000.000,00				Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Papua Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supat, Wampan, Vajene
1	02	01	1.0.5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	117.000.000,00	-	139.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	1.650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.02				Pengadaan Pakan Dinas Bersama Akibat Kematangan				-		-					Dinas Kesehatan
							Jumlah Paket Pakan Dinas Bersama Akibat Kematangan	Paket	2 Paket		117.000.000,00	2 Paket	139.000.000,00	37 Paket	1.000.000.000,00	37 Paket	1.100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.04				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		-					Dinas Kesehatan
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		-	10 Orang	500.000.000,00	10 Ora	550.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.397.427.375,60	-	1.441.808.084,00	-	3.200.000.000,00	-	3.520.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		-					Dinas Kesehatan
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket		3.979.294,00	1 Paket	3.977.400,00	20 Paket	800.000.000,00	20 Pak	880.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.03				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		-					Dinas Kesehatan
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket		339.707.983,60	2 Paket	363.250.434,00	20 Paket	500.000.000,00	20 Pak	550.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.05				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		-					Dinas Kesehatan
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3 Paket		0,00	0,00	0,00	50 Paket	500.000.000,00	50 Pak	550.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.06				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		-					Dinas Kesehatan
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	5 Paket		88.420.000,00	5 Paket	88.000.000,00	5 Paket	200.000.000,00	5 Paket	220.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.07				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-		-					Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2 Dokumen		45.000.000,00	2 Dokumen	50000000	1 paket	15000000	1 paket	60.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.08				Penyediaan Bahan/Material				-		-					Dinas Kesehatan
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5 Paket		0,00	0,00	0,00	20 Paket	200.000.000,00	20 Pak	220.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		-					Dinas Kesehatan
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	30 Laporan		900.340.000,00	30 Laporan	1.000.000.000,00	50 Laporan	1.000.000.000,00	50 Lap	1.100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.10				Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uang				-		-					Dinas Kesehatan
1	02	01	1.0.5.11				Pengadaan Kebutuhan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Sebelum				-		-					Dinas Kesehatan

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Keberhasilan pembangunan kesehatan 5 tahun kedepan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pengenalan terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dapat memaksimalkan faktor pendorong dan meminimalkan faktor penghambat. Faktor internal dan eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut. Faktor Internal, berupa kekuatan dan kelemahan yaitu :

Kekuatan :

1. Adanya SOTK yang jelas
2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Adanya sumberdaya manusia yang kompeten
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta lingkungan kerja yang kondusif.
5. Adanya tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi aparatur

Kelemahan :

1. Disiplin aparatur rendah
2. Distribusi staf belum optimal
3. Pemahaman tugas dan fungsi oleh aparatur belum optimal
4. Motivasi kerja aparatur rendah
5. Manajemen kinerja belum optimal
6. Koordinasi antar unit belum optimal Faktor eksternal, berupa peluang dan tantangan yaitu :

Peluang :

1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung urusan Kesehatan
2. Dana OTSUS Kesehatan 15%
3. Adanya Jaminan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua (OAP)
4. Adanya kesepakatan Global (SDGs)
5. Adanya dukungan stakeholders/ mitra/NGOs terhadap pelaksanaan urusan kesehatan
6. Sasaran pembangunan bidang kesehatan sejalan dengan sasaran pembangunan Kementerian Kesehatan

Tantangan :

1. Pendidikan masih rendah
2. Angka kemiskinan relatif tinggi dan pengangguran cukup tinggi
3. Pecandu minuman keras relatif tinggi dan penggunaan narkoba/zat aditif cenderung meningkat.
4. Wilayah kerja yang luas
5. Persebaran penduduk tidak merata/ tersebar dalam kelompok-kelompok kecil.
6. Kondisi dan karakteristik geografis yang ekstrim
7. Transportasi yang sulit, terbatas dan mahal dan sistem terintegrasi

2.6. Krisis Kesehatan, Kejadian Luar Biasa dalam Rangka Pencapaian SPM Provinsi

Tabel Capaian Krisis Kesehatan, Kejadian Luar Biasa Dalam Rangka SPM Provinsi

NO	INDIKATOR	TARGET							CAPAIAN						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana	9,900	8,910	8,019	7,217	6,495	5,846	6,752	9,900	42,939	57,638	7,217	--	--	--
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	452	407	366	329	296	266	--	159	15	1,020	710	--	--	--

Krisis Kesehatan merupakan capaian kinerja standar pelayanan minimal provinsi papua dari 12 indikator capaian standar pelayanan minimal 10 di kerjakan di kabupaten dan dua indikator di provinsi yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau potensi bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa diatas data target tahun 2024 sampai 2026 yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua

2.7. Pencapaian target RPJMN 2024 – 2029

Asa cita presiden dan wakil presiden republic Indonesia 2024 – 2025 :

1. Memperkokoh idiologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) ;
2. Memantapkan sistem keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau,dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif,dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Adapun fungsinya adalah Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengkoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi meliputi :

1. Masih rendahnya usia harapan hidup (UHH);
2. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
3. Masih tingginya angka Stunting;
4. Tingginya angka kesakitan AIDS, TB Paru, dan Malaria;
5. kekurangan jumlah dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang berkualitas;

6. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan yang masih terbatas;
7. Belum meratanya Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Masih rendahnya Fasilitas Kesehatan Primer dan Rujukan yang terstandarisasi/ diakreditasi;

3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Penjabat Kepala Daerah

Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran, Outcome dan Indikator
Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	OUT COME	INDIKATOR
Terwujudnya sumber daya manusia Papua yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing		Manusia yang memiliki kesehatan prima	Angka Harapan Hidup
	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Balita kekurangan gizi yg mendapatkan pelayanan kesehatan	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
		Bayi yang lahir hidup	Angka kematian bayi per 1.0000 kelahiran hidup
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik			
	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua	Dokumen Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai SAKIP

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI

Telaah Renstra Kemenetrian Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024, terdapat 6 tujuan dalam pencapaian selama periode 2020 – 2024.

Berikut telaahan sasaran strategis Renstra Kementerian Kesehatan.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemeterian
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1 menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga 1.2 Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer 1.3 Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1 Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan 2.2 Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik 2.3 Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1 Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri 3.2 Menguatnya surveilans yang adekuat 3.3 Menguatnya sisitem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efesien dan Berkeadilan	4.1 Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan 4.2 Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif 4.3 Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efesien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1 Meningkatkan pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas 5.2 Meningkatkan kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan 5.3 Meningkatkan sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1 Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 6.2 Meningkatkan kebijakan kesehatan berbasis bukti 6.3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Strategi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran		Strategi
Terwujudnya sumber daya manusia Papua yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>
		2	Integrasi layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat kurang mampu

Tujuan	Sasaran		Strategi
		3	Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan
		4	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat
			Pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan
		5	Peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta pemenuhan gizi masyarakat
			Mendorong konsumsi makann sehat dan bergizi sebagai upaya mengatasi stunting
		6	Peningkatan kapasitas manajemen pendataan kesehatan dalam sistem informasi pembangunan daerah
		7	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui program kerja sama dan pelatihan
		8	Peningkatan pengawasan penyebaran penyakit HIV/AIDS, TBC dan Malaria
			Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua		Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

1. Menurunnya AKI (per 100.000 kelahiran hidup) menjadi 183.
2. Menurunnya AKB(per 1.000 kelahiran hidup) menjadi 16.
3. Menurunnya Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) (%) menjadi 14%.
4. Menurunnya *Wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) menjadi 7,0%
5. Menurunnya Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) menjadi 0,18.
6. Menurunnya Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) menjadi 190.


7. Menurunnya Prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun menjadi 21,8
8. Menurunnya Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%
9. Meningkatnya Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar menjadi 100.
10. Meningkatnya Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar menjadi 92.
11. Meningkatnya Persentase FKTP terakreditasi menjadi 100
12. Meningkatnya Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas menjadi 80.
13. Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit menjadi < 2,5.
14. Persentase kabupaten / kota yang melakukan respon KLB / wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tata Laksana Kasus) menjadi 80
15. Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan menjadi 100.
16. Persentase Faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar menjadi 100

3.4. Telaah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Telaah rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2018 – 2023 posisi saat ditelaah menggunakan data tahun 2022 hasilnya sebagai berikut :

1. Capaian AKI (per 100.000 kelahiran hidup) yaitu 248 sedangkan targetnya adalah 204 (AKI lebih tinggi 44 bila dibandingkan dengan target)
2. Capaian AKB (per 1.000 kelahiran hidup) dari target tahun 2022 yaitu 15 sedangkan targetnya adalah 21 (AKB lebih rendah 6 bila dibandingkan dengan target)

3. Capaian Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) tahun 2022 yaitu 34,6 % sedangkan targetnya adalah 24 % (capaian prevalensi stunting lebih tinggi dari pada target yang telah ditentukan sedangkan secara Nasional angka stunting tahun 2022 yaitu 21,6%).
4. Capaian *Wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) dari target tahun 2022 belum mencapai target.
5. Capaian Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) dari target tahun 2022 55 % minum obat arv Tidak Sesuai Target 100 % minum obat .
6. Capaian Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) dari target tahun 2022 : 84 % Tidak Sesuai Target 100 %
7. Capaian Prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun dari target tahun 2022 belum mencapai target.
8. Capaian Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun dari target tahun 2022 belum mencapai target.
9. Capaian Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar dari target tahun 2022 belum mencapai target.
10. Capaian Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar dari target tahun 2022 (Sesuai/Tidak Sesuai Target).
11. Capaian Persentase FKTP terakreditasi dari target tahun 2022 (Sesuai/Tidak Sesuai Target).
12. Capaian Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas dari target tahun 2022 (Sesuai/Tidak Sesuai Target).

- 
13. Capaian penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit menjadi dari target tahun 2022 belum mencapai target.
 14. Capaian kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/Wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus) dari target tahun 2022 penyakit berpotensi wabah telah ditangani
 15. Capaian cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan dari target tahun 2022 belum mencapai target.
 16. Capaian Faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar dari target tahun 2022 mencapai 71% dari data belum mencapai target 100 % fasilitas Kesehatan dengan 5 jenis tenaga dengan standar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi urusan kesehatan sebagaimana tertuang didalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023 sebagaimana uraian sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Persentase Distrik yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi sebesar 71,23%.
2. Persentase Rumah Sakit yang tersertifikas Akreditasi sebesar 100%
3. Presentase Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan Papua sebesar 64%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Cakupan (%) kunjungan ibu hamil K4 sebesar 70%,
2. Cakupan (%) pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 45%,
3. Cakupan (%) pelayanan anak balita sebesar 40%,
4. Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (stunting) sebesar 23%,
5. Cakupan (%) masyarakat akses terhadap air bersih sebesar 30%,
6. Cakupan (%) keluarga akses terhadap sanitasi sebesar 60%,

7. Cakupan (%) PHBS sebesar 45%,
8. Cakupan (%) Poyandu Aktif sebesar 87%

Sasaran 3 : Mengendalikan, mencegah dan memberantas penyakit dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria sebesar 69%
2. Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin 32,2%
3. Persentase pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati sebesar 95%
4. Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu sebesar 6 Kab/Kota
5. Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA sebesar 22,8%
6. Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) sebesar 95%
7. Cakupan pelayanan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB) Provinsi sebesar 100%
8. Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan angka Prevalensi Kusta < 1 per 10.000 penduduk sebesar 23 kab/kota
9. Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria (kaki gajah) 18 Kabupaten /Kota

Sasaran 4 : Mengkatnya kualitas sumberdaya kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Persentase puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga (Perawat, Bidan, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan) sebesar 90%

2. Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin sebesar 92%
3. Persentase Pelaksanaan Diklat sesuai standart sebesar 100%

Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Persentase ketersediaan puskesmas di daerah perbatasan sebesar 100%
2. Cakupan pelayanan kesehatan (KIA, Gizi dan penyakit menular) di daerah perbatasan, terbelakang terdepan, terluar dan tertentu sebesar 50%
3. Cakupan pelayanan kesehatan didaerah bencana /berpotensi bencana dalam krisis bencana sebesar 100 %

Sasaran 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) daerah sebesar 88%.

Tujuan sasaran dan indikator kinerja serta pentahapan pencapaiannya sebagaimana disajikan pada matriks tabel berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023
Untuk mendukung sasaran RPJMD Provinsi Papua 2019 – 2023

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR
Terwujudnya sumber daya manusia Papua yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing		Manusia yang memiliki kesehatan prima	Angka Harapan Hidup

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR
	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Balita kekurangan gizi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
		Bayi yang lahir hidup	Angka kematian bayi per 1.0000 kelahiran hidup
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik			
	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua	Dokumen Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai SAKIP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 di bidang/urusan kesehatan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026, dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudnya tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua yakni ***“Papua Sehat yang Berkeadilan”*** maka harus didukung dengan strategi dan arah kebijakan yang tepat, selaras dan konsisten dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dan kemandirian yang berkeadilan Masyarakat adalah penerima pelayanan dan sekaligus sebagai pelaku pelayanan kesehatan sampai di daerah terpencil dan terisolir demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Menjangkau masyarakat di daerah terpencil melalui Pelayanan Kesehatan bergerak kaki telanjang.
2. Intervensi berbasis / pendekatan wilayah (berbasis kewilayahan). Keragaman etnis dan budaya serta karakteristik wilayah mengharuskan program pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan berbasis wilayah, sehingga intervensi pelayanan di 2 wilayah adat yang meliputi Wilayah Adat Mamta yang meliputi Kabupaten Jayapura, Keerom, Membramo Raya, Sarmi dan Kota Jayapura, dan Wilayah Adat Saereri yang meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen,

3. Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan (continuum of care) Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui peningkatan disiplin, kinerja dan kapasitas aparatur serta penerapan SAKIP secara konsisten. Strategi dan arah kebijakan mewujudkan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026


Strategi		Arah Kebijakan
Peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>	1.	Percepatan capaian pelayanan kesehatan masyarakat
Integrasi layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat kurang mampu		Membentuk PERGUB / PERDA dan penyediaan anggaran yang dimaksud
Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan		Pengadaan Obat-Obatan dan alat kesehatan yang berkualitas dan sesuai regulasi
Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat		Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat
Pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan		Melakukan pelayanan sesuai SOP dalam pelayanan kesehatan masyarakat
Peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta pemenuhan gizi masyarakat		Pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Pelayanan kesehatan masa nifas, Inisiasi menyusui dini (IMD), Memenuhi kebutuhan gizi, memperkuat sistem surveilans pangan dan gizi,
Mendorong konsumsi makanan sehat dan bergizi sebagai upaya mengatasi stunting		Mendorong konsumsi makanan sehat dan bergizi sebagai upaya mengatasi stunting
Peningkatan kapasitas manajemen pendataan kesehatan dalam sistem informasi pembangunan daerah		Peningkatan kapasitas manajemen pendataan kesehatan dalam sistem informasi pembangunan daerah

Strategi		Arah Kebijakan
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui program kerja sama dan pelatihan		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui program kerja sama dan pelatihan
Peningkatan pengawasan penyebaran penyakit HIV/AIDS, TBC dan Malaria		Peningkatan pengawasan penyebaran penyakit HIV/AIDS, TBC dan Malaria
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana		Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana
Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	1.	Monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan konsisten
	2.	Penegakan disiplin dan penilaian kinerja yang obyektif
	3.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Tujuan pembangunan setiap tahun selama periode RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran :

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi
2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan
3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi

- 
8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
 9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan 2 : Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah
Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan
Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah
3. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.
4. Menyiapkan papua gerbang ekspor.
5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.
6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan.
7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Tujuan 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat
3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Arah Kebijakan Tahun 2024 Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Arah Kebijakan Tahun 2025 Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Arah Kebijakan Tahun 2026 Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah

Dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional RPJMN 2024 – 2029 maka dilakukan kolaborasi kordinasi antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit guna kolaborasi pencapaian target ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan tahun 2024-2026 (TC. 26)

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Terwujudnya sumber daya manusia Papua yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	1.	Peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>	1.	Percepatan capaian pelayanan kesehatan masyarakat
		2.	Integrasi layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat kurang mampu		Membentuk PERGUB / PERDA dan penyediaan anggaran yang dimaksud
		3.	Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan		Pengadaan Obat-Obatan dan alat kesehatan yang berkualitas dan sesuai regulasi
		4.	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat		Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat
			Pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan		Melakukan pelayanan sesuai SOP dalam pelayanan kesehatan masyarakat
		5.	Peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta pemenuhan gizi masyarakat		Pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Pelayanan kesehatan masa nifas, Inisiasi menyusui dini (IMD), Memenuhi kebutuhan gizi, memperkuat sistem surveilans pangan dan gizi,
			Mendorong konsumsi makanan sehat dan bergizi sebagai upaya mengatasi stunting		Mendorong konsumsi makanan sehat dan bergizi sebagai upaya mengatasi stunting
		6.	Peningkatan kapasitas manajemen pendataan kesehatan dalam sistem informasi pembangunan daerah		Peningkatan kapasitas manajemen pendataan kesehatan dalam sistem informasi pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
		7.	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui program kerja sama dan pelatihan		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui program kerja sama dan pelatihan
		8.	Peningkatan pengawasan penyebaran penyakit HIV/AIDS, TBC dan Malaria		Peningkatan pengawasan penyebaran penyakit HIV/AIDS, TBC dan Malaria
			Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana		Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua		Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	1.	Monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan konsisten
				2.	Penegakan disiplin dan penilaian kinerja yang obyektif
				3.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 merupakan arah dan pentahapan pelaksanaan pembangunan urusan kesehatan selama transisi ke depan yang disusun dalam sejumlah rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif sebagaimana disajikan dalam table 6.1.

Program – program yang disusun merupakan program rutin dan urusan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan prioritas utama mendukung program prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 – 2026 dan program lanjutan periode sebelumnya yang belum tuntas antara lain, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang tersertifikasi akreditasi, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Status Gizi Masyarakat dan Penurunan Prevalensi Anak Kerdil/Anak Kurus dan Sangat Kurus (Stunting), Pendampingan Daerah Bermasalah Kesehatan, Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular HIV – AIDS, Tuberkulosa dan Malaria dan Pemberantasan Penyakit Menular Terabaikan (penyakit menular endemik pada daerah terbelakang, terpencil dan terdepan) seperti Kusta, Filaria (Kaki Gajah)

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kesehatan Provinsi papua Tahun 2024 – 2026 (TC. 27)**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0				1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-						Dinas Kesehatan	204 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
									Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber	-	-		30 Dokumen	-	0,00	30 Dokumen	100.000.000,00	30 Dokumen	30 Dokumen	Dinas Kesehatan	205 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	03	3.02		Pengembangan Modul dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	-	-		30 Dokumen	-	50.000.000,00	-	500.000.000,00	-	30 Dokumen	Dinas Kesehatan	206 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	03	3.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik										Dinas Kesehatan	207 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)	
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia	Dokumen	3 Dokumen		#VALUE!	3 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	500.000.000,00	10 Dokumen	#VALUE!	Dinas Kesehatan	208 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	03	3.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	-	Dokumen	9 Dokumen	#VALUE!	-	9 Dokumen	-	1.000.000.000,00	9 Dokumen	#VALUE!	Dinas Kesehatan	209 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	03	3.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN				-					-	-	Dinas Kesehatan	210 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
									Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang	50 Orang		#VALUE!	50 Orang	0,00	100 Orang	1.000.000.000,00	100 Orang	#VALUE!	Dinas Kesehatan	211 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	199.200.000,00	9 Dokumen	1.000.000.000,00	9 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Kesehatan	212 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	99.900.000,00	9 Dokumen	500.000.000,00	9 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Kesehatan	213 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF				-					-	-	Dinas Kesehatan	214 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
									Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan	Sarana	32 Sarana		#VALUE!	32 Sarana	99.900.000,00	38 Sarana	500.000.000,00	41 Sarana	41 Sarana	Dinas Kesehatan	215 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak, Supiori, Waropen, Yapen)
				1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-	9 Dokumen	#VALUE!	9 Dokumen	99.300.000,00	9 Dokumen	500.000.000,00	9 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Kesehatan	216 Kabupaten , 1 Kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Memberamo Raya, Biak,

[illegible]

1	02	02	3.0	00	2	45	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	-	9	Dokumen	0,00	5	Dokumen	700.000.000,00	5	Dokumen	770.000.000,00	Dinas Kesehatan	Normanagapan - Kota & Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Paniajen, Sentani, Mamberamo Raya, Bora, Sagarua, Manupya, Vazanti)
1	02	02	3.0	00	2	47	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Dokumen	-	3	Dokumen	0,00	5	Dokumen	500.000.000,00	5	Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kesehatan	Normanagapan - Kota & Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Paniajen, Sentani, Mamberamo Raya, Bora, Sagarua, Manupya, Vazanti)
1	02	02	3.0	00	2	48	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Dokumen	-	3	Dokumen	0,00	5	Dokumen	500.000.000,00	5	Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kesehatan	Normanagapan - Kota & Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Paniajen, Sentani, Mamberamo Raya, Bora, Sagarua, Manupya, Vazanti)
1	02	02	3.0	00	2	49	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen	-	3	Dokumen	0,00	5	Dokumen	500.000.000,00	5	Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kesehatan	Normanagapan - Kota & Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Paniajen, Sentani, Mamberamo Raya, Bora, Sagarua, Manupya, Vazanti)
1	02	02	3.0	00	2	50	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen	-	3	Dokumen	0,00	5	Dokumen	500.000.000,00	5	Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kesehatan	Normanagapan - Kota & Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Paniajen, Sentani, Mamberamo Raya, Bora, Sagarua, Manupya, Vazanti)
1	02	02	3.0	00	2	51	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Dokumen	-	3	Dokumen	0,00	5	Dokumen	500.000.000,00	5	Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kesehatan	Normanagapan - Kota & Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Paniajen, Sentani, Mamberamo Raya, Bora, Sagarua, Manupya, Vazanti)
1	02	02	3.0	00	2	52	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Dokumen	-	3	Dokumen	0,00	5	Dokumen	500.000.000,00	5	Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kesehatan	Normanagapan - Kota & Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Paniajen, Sentani, Mamberamo Raya, Bora, Sagarua, Manupya, Vazanti)

			1	02	02	3.0 2 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	-	3 Dokumen	0,00	5 Dokumen	500.000.000,00	5 Dokumen	550.000.000,00			178 Kabupaten , 1 Kota Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberikoro Raya, Bulik, Sentani, Wampan, Yagaji)	Dinas Kesehatan	26
			1	02	02	3.0 2 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	-	3 Dokumen	0,00	9 Dokumen	700.000.000,00	9 Dokumen	770.000.000,00			178 Kabupaten , 1 Kota Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberikoro Raya, Bulik, Sentani, Wampan, Yagaji)	Dinas Kesehatan	26
			1	02	02	3.0 2 41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	-	3 Dokumen	0,00	5 Dokumen	500.000.000,00	5 Dokumen	550.000.000,00			178 Kabupaten , 1 Kota Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberikoro Raya, Bulik, Sentani, Wampan, Yagaji)	Dinas Kesehatan	26
			1	02	02	3.0 2 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	-	3 Dokumen	0,00	5 Dokumen	500.000.000,00	5 Dokumen	550.000.000,00			178 Kabupaten , 1 Kota Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberikoro Raya, Bulik, Sentani, Wampan, Yagaji)	Dinas Kesehatan	26
			1	02	02	3.0 2 43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	-	3 Dokumen	0,00	5 Dokumen	500.000.000,00	5 Dokumen	550.000.000,00			178 Kabupaten , 1 Kota Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberikoro Raya, Bulik, Sentani, Wampan, Yagaji)	Dinas Kesehatan	26
			1	02	02	3.0 2 44	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen	-	1 dokumen	0,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	33.000.000,00			178 Kabupaten , 1 Kota Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberikoro Raya, Bulik, Sentani, Wampan, Yagaji)	Dinas Kesehatan	26
			1	02	02	3.0 2 45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	-	3 Dokumen	0,00	9 Dokumen	1.000.000.000,00	9 Dokumen	1.100.000.000,00			178 Kabupaten , 1 Kota Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberikoro Raya, Bulik, Sentani, Wampan, Yagaji)	Dinas Kesehatan	26

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			1	02	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	117.000.000,00	-	130.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	1.650.000.000,00			Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)
								Perencanaan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan		1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
Terselanjutnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat di 9 Kabupaten/Kota	Tingkat kesehatan masyarakat di 9 Kabupaten/Kota meningkat						Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	Unit	-	2 Unit	0,00	-	-	2 unit	1.000.000.000,00	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
								Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan	Unit	6 Unit	-	6 Unit	0,00	-	6 unit	100.000.000,00	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Pengadaan Mebel			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
								Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	Paket	6 Paket	-	6 Paket	0,00	20 Paket	500.000.000,00	20 Pak	550.000.000,00	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	12 Unit	-	12 Unit	0,00	30 Unit	500.000.000,00	30 Unit	550.000.000,00	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	1.000.000.000,00	6 Unit	1.320.000.000,00	6 unit	1.320.000.000,00	6 unit	1.320.000.000,00	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.886.301.000,00	-	2.073.880.000,00	-	2.820.355.000,00	-	3.102.390.500,00	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Penyediaan Jasa Sifat Menyurat			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	30 Laporan	-	30 Laporan	0,00	20 Laporan	20.000.000,00	20 Lap	22.000.000,00	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	10 Laporan	1.177.000.000,00	10 Laporan	1.180.000.000,00	25 Laporan	1.800.000.000,00	25 Lap	1.980.000.000,00	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan	Laporan	6 Unit	990.000.000,00	6 Unit	1.100.000.000,00	4 unit	1.200.000.000,00	4 unit	1.320.000.000,00	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	3 Laporan	488.881.000,00	3 Laporan	543.990.000,00	12 Laporan	1.000.355.000,00	12 Lap	1.100.390.500,00	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.400.000,00	-	216.000.000,00	-	800.000.000,00	-	600.000.000,00	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	
			1	02	01	1.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Bani, Supit, Wampan, Yajaji)	

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Isinya

1. IKU 2024 – 2026
2. IKK 2024 – 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menjadi target capaian dalam sebuah periode pembangunan. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu target capaian dari program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026. Berikut masing-masing indikator kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua 2024 - 2026, sebagai berikut :


Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua
yang Mengacu Pada Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Tahun 2024 – 2026 (TC. 28)

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke ...				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Kesehatan							
1.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kh	4.00	4.00	4.00	3.00		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	persen	5.50	5.20	4.90	4.60		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke ...				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
2	Kesehatan							
2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	30.00	31.30	40.30	41.20		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	10.62	12.12	14.02	15.92		
2.3	Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	150.00	150.90	151.40	152.92		
2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	70.00	70.00	75.00	80.00		
2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	40.00	45.00	50.00	55.00		
2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	89.66	90.56	92.46	93.36		
2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA berkualitas	persen	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00	
2.8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	45.00	45.95	46.80	47.30		
2.9	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	41.38	42.57	51.57	60.57		
2.10	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	92.00	95.00	98.00	100.00	385.00	
2.11	Persentase PAK yang diawasi	persen	100.00	90.00	95.00	100.00	100.00	
2.12	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	persen	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00	
2.13	API malaria	persen	25.64	25.54	24.60	23.70	23.70	
2.14	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	32.64	31.74	30.84	29.95	29.95	
2.15	Tingkat prevalensi DBD	persen	60.74	59.84	50.84	49.94	49.94	
2.16	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	30.57	29.67	28.77	27.87	27.87	
2.17	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1000 penduduk	9.00	8.90	8.00	7.10	7.10	
2.18	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1000 penduduk	34.18	26.33	22.78	21.94	21.94	
2.19	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00	
2.20	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen	100.00					
2.21	Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra	kabupaten/kota	16.00					
2.22	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	
2.23	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	5.00	5.30	5.61	60.00	60.00	
2.24	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	kasus	150.00	135.00	121.50	109.35	109.35	
2.25	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	persen	60.00	54.00	48.60	43.74	43.74	
2.26	Cakupan pelayanan nifas	persen	45.00	45.90	46.81	47.69	47.69	
2.27	Cakupan kelurahan/kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	65.00	65.47	70.23	70.56	70.56	
2.28	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima	persen	25.00	22.50	20.25	18.22	18.22	
2.29	Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	0.65	0.58	0.52	0.47	0.47	
2.30	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	
2.31	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 kh	4.00	3.60	3.24	2.91	2.91	
2.32	Rasio posyandu yang aktif	persen	70.00	70.91	71.86	80.86		
2.33	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	52.00	61.00	61.90	70.90		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke ...				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Kesehatan							
1.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	4.00	4.00	4.00	3.00		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	persen	5.50	5.20	4.90	4.60		
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
2	Kesehatan							
2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	30.00	31.30	40.30	41.20		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	10.62	12.12	14.02	15.92		
2.3	Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	150.00	150.90	151.40	152.92		
2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	70.00	70.00	75.00	80.00		
2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	40.00	45.00	50.00	55.00		
2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	89.66	90.56	92.46	93.36		
2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA berkualitas	persen	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00	
2.8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	45.00	45.95	46.80	47.30		
2.9	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	41.38	42.57	51.57	60.57		
2.10	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	92.00	95.00	98.00	100.00	385.00	
2.11	Persentase PAK yang diawasi	persen	100.00	90.00	95.00	100.00	100.00	
2.12	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	persen	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00	
2.13	API malaria	persen	25.64	25.54	24.60	23.70	23.70	
2.14	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	32.64	31.74	30.84	29.95	29.95	
2.15	Tingkat prevalensi DBD	persen	60.74	59.84	50.84	49.94	49.94	
2.16	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	30.57	29.67	28.77	27.87	27.87	
2.17	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1000 penduduk	9.00	8.90	8.00	7.10	7.10	
2.18	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1000 penduduk	34.18	26.33	22.78	21.94	21.94	
2.19	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00	
2.20	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen	100.00					
2.21	Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra	kabupaten/kota	16.00					
2.22	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	
2.23	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	5.00	5.30	5.61	60.00	60.00	
2.24	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	kasus	150.00	135.00	121.50	109.35	109.35	
2.25	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	persen	60.00	54.00	48.60	43.74	43.74	
2.26	Cakupan pelayanan nifas	persen	45.00	45.90	46.81	47.69	47.69	
2.27	Cakupan kelurahan/kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	65.00	65.47	70.23	70.56	70.56	
2.28	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima	persen	25.00	22.50	20.25	18.22	18.22	
2.29	Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	0.65	0.58	0.52	0.47	0.47	
2.30	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	
2.31	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 kh	4.00	3.60	3.24	2.91	2.91	
2.32	Rasio posyandu yang aktif	persen	70.00	70.91	71.86	80.86		
2.33	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	52.00	61.00	61.90	70.90		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke ...				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
2.34	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	52.00	52.90	61.90	62.80	
2.35	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang di gunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2,300.00	2,267.00	2,236.00	2,204.00	
2.36	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	50.00	51.90	52.02	65.54	
2.37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	70.00	75.05	80.12	81.02	
2.38	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	27.00				
2.39	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan	unit	8.00	5.00	5.00	5.00	
2.40	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	29.10	29.10	29.10	29.10	30.00
2.41	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	4.50	5.40	6.30	6.81	
2.42	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	30.25	31.15	32.05	32.95	
2.43	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1.20	1.22	1.25	1.28	
2.44	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	90.00	90.00	90.00	9.00	90.00
2.45	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan	persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
2.46	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
2.47	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	2.00	100.00	100.00	200.00	400.00
2.48	Cakupan jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi	persen	60.00	61.12	62.62	63.92	
2.49	Cakupan layanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	40.00	40.91	42.83	44.70	
2.50	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00
2.51	Cakupan Rumah Sakit Kelas C	persen	58.62	61.12	64.30	68.53	68.53
2.52	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00
2.53	Bed Occupancy Ratio (BOR)	persen	45.00	45.50	46.40	47.72	47.72
2.54	Cakupan Rumah Sakit Kelas C	persen	58.62	59.53	60.42	61.33	61.33
2.55	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00
2.56	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	persen	73.00	75.10	77.30	79.50	79.50
2.57	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00
2.58	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen	90.00	93.00	95.00	98.00	98.00
2.59	cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	40.00	40.00	41.56	47.12	
2.60	Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	45.25	47.23	49.25	51.75	
2.61	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.62	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024 – 2026 yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 harus memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua 2005 – 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018 – 2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu – isu strategis yang berkembang
6. Kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku Dalam Dokumen RPD tercantum indikator kinerja setiap Perangkat Daerah, yang merupakan acuan bagi pelaksanaan prioritas pembangunan.
7. Kolaborasi pencapaian target RPJMN 2024 – 2029 antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis transisi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 telah disusun dengan memperhatikan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2005 – 2025 serta RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 serta prioritas daerah bidang kesehatan yang akan dihadapi dalam waktu 2 (dua) tahun akan datang.

Renstra transisi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua dibidang/urusan kesehatan, selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja).

Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Papua termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi unit bawahannya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra ini, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Pada akhirnya diharapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 ini dapat mencapai tujuan dan dapat memberi kontribusi nyata bagi pencapaian RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026


dalam mewujudkan visi RPJP ***“PAPUA YANG MANDIRI SECARA SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK”***.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan yang harus dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja) dan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya.

Dalam menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pelaksanaan Renstra, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh jajaran Dinas Kesehatan termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
2. Kepala Dinas Kesehatan harus mengawal dan mengarahkan semua potensi dan jajarannya dalam melaksanakan target – target yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026.
3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 harus berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026.
4. Sekretariat melalui Sub Bagian Program melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026.
5. Pimpinan UPT dalam penyusunan Renstra wajib berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengusulan Rencana Usulan Kegiatan.

- 
6. Kolaborasi untuk mencapai RPJMN Tahun 2024 – 2029 antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8.2. Pedoman Transisi

Demi menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026. Berkenaan dengan itu maka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027 ketika belum ditetapkan Renstra baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua, program strategis bidang kesehatan provinsi dan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat serta kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya Renja tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.